

LAPORAN PRAKTIKUM KOMUNITAS

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK
PEDULI PENYANDANG DISABILITAS DI DESA
BABATAN KECAMATAN KADUGEDE
KABUPATEN KUNINGAN**

Oleh:
Raka Satria Marthasedana
NRP. 2104125



PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG
2024

LAPORAN PRAKTIKUM KOMUNITAS
REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT MELALUI
KELOMPOK PEDULI DISABILITAS DI DESA
BABATAN KECAMATAN KADUGEDE
KABUPATEN KUNINGAN

Oleh:

Raka Satria Marthasedana

NRP. 2104125

Telah disetujui pada tanggal: 27 Desember 2024

Oleh:

Pembimbing I



Wiwit Widiansyah, S.ST., M.Si.

Pembimbing II



Susilawati, M.Si., Ph.D.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Pekerjaan Sosial

Program Sarjana Terapan

Politeknik Kesejahteraan Sosial



Dr. Denti Kardeti, M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur praktikan panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya praktikan dapat menyelesaikan Kegiatan Praktikum Komunitas praktik pekerjaan sosial dan Laporan Praktikum Komunitas yang berjudul Rehabilitasi berbasis Masyarakat Melalui Kelompok Peduli Disabilitas Di Desa Babatan yang dilaksanakan di Desa Babatan Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil kegiatan Praktikum Komunitas yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober – 06 Desember 2024 yang dilaksanakan di Desa Babatan, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Praktikan menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan Praktikum Institusi tidak lepas dari doa, dukungan, bantuan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis dengan hormat dan bangga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Suharma, S.Sos., MP., Ph.D., Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Dr. Denti Kardeti, M.Si., Ketua Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
3. Dr. Rahmat Syarif Hidayat, S.ST., MPS., Sp., Kepala Laboratorium Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan.
4. Wiwit Widiyansyah, S.ST., M.Si. Dosen Pembimbing dan Supervisor Praktikum Komunitas yang telah banyak memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan arahan, bimbingan, dorongan, dan masukan dengan penuh ketulusan dan perhatian.
5. Susilawati, M.Si., Ph.D. Dosen Pembimbing dan Supervisor Praktikum Komunitas yang telah banyak memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan arahan, bimbingan, dorongan, dan masukan dengan penuh ketulusan dan perhatian.
6. Romi Andrian S.Pd.I Kepala Desa yang telah menerima dan mendukung praktikan untuk melaksanakan Praktikum Komunitas di Desa Babatan, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan.

7. Dudi Imanudin Pembimbing lapangan yang telah mendampingi praktikan dalam proses dalam pelaksanaan Praktikum Komunitas, memberikan ilmu, masukan, arahan, dan dorongan dengan penuh kesabaran dan bimbingan penuh praktikan dari awal hingga akhir Praktikum Komunitas.
8. Tim Kerja Masyarakat (TKM) RBM Kelompok Peduli Disabilitas yang telah membantu pelaksanaan penyuluhan, pemberdayaan, dan keberlanjutan program.
9. Rekan-rekan kelompok 17 yaitu (Anto, Daffa, Noela, Sanaya, Tri Utami, Nadjela, Helga, Iffa, Prasasti dan Ansharudin) yang telah bekerja sama dengan baik, saling memberikan dukungan selama melakukan kegiatan Praktikum Komunitas.
10. Semua pihak yang tidak bisa praktikan ucapkan satu-persatu yang telah mendukung keberlangsungan proses pelaksanaan dan penyusunan laporan.

Laporan Praktikum Komunitas ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan Praktikum Komunitas yang telah saya lakukan di Desa babatan, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Saya menyadari bahwa hasil laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam penulisan maupun pada pendapat dan teori. Untuk itu, praktikan meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan hasil laporan ini.

Terakhir, semoga semua kebaikan serta ketulusan semua pihak yang telah memberikan dukungan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Demikian laporan ini disusun. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan pengetahuan serta pemahaman kedepan.

Bandung, Desember 2024

Raka Satria Marthasedana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Praktikum Komunitas	1
1.2. Tujuan Umum Praktikum Komunitas	2
1.3. Manfaat Praktikum Komunitas	3
1.4. Sasaran	4
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL PRAKTIKUM KOMUNITAS	6
2.1. Metode Pekerjaan Sosial	6
2.1.1. Pekerjaan sosial dengan komunitas (<i>Community work</i>)	6
2.1.2. Pekerja Sosial dengan Kelompok (<i>Group Work</i>)	15
2.2 Tahapan dalam Proses Pekerjaan Sosial	18
2.2.1 Membangun Relasi (<i>Dialog</i>)	18
2.2.2 Asesmen (<i>Discovery</i>)	19
2.2.3 Rencana Intervensi (<i>Discovery</i>)	20
2.2.4 Intervensi (<i>Development</i>)	21
2.2.5 Evaluasi (<i>Development</i>)	22
2.2.6 Terminasi dan Rujukan (<i>Community</i>)	23
2.3 Peran Pekerja Sosial dalam <i>Community Work</i> dan <i>Group Work</i>	24
2.3.1 Peran Pekerja Sosial dalam <i>Community Work</i>	24
2.3.2 Peran Pekerja Sosial dalam <i>Group Work</i>	34
2.4 Pemberdayaan	36
2.4.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	37
2.4.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	39

2.4.3	Fase Pemberdayaan Masyarakat	40
2.4.4	Peran Pemberdayaan Masyarakat	41
2.5	Konsep Penyuluhan Sosial	42
2.5.1.	Definisi Penyuluhan Sosial.....	43
2.5.2.	Fungsi Penyuluhan Sosial	43
2.5.3.	Metode Penyuluhan Sosial	44
2.5.4.	Prinsip Penyuluhan Sosial	45
2.6	Penyandang Disabilitas	46
2.6.1	Ragam Disabilitas	46
2.6.2	Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	47
2.7	Aksesibilitas.....	48
2.7.1	Definisi Aksesibilitas.....	48
2.7.2	Dimensi Aksesibilitas.....	49
2.7.3	Prinsip Aksesibilitas.....	49
2.7.4	Tantangan dalam Implementasi Aksesibilitas.....	50
2.8	Layanan Sosial	50
2.8.1	Definisi Layanan Sosial	50
2.8.2	Tujuan Layanan Sosial	51
2.8.3	Jenis-Jenis Layanan Sosial.....	51
2.8.4	Prinsip Layanan Sosial.....	52
2.9	Regulasi yang mendukung penanganan kasus	52
BAB III KONTEKS PRAKTIKUM KOMUNITAS.....		54
3.1.	Gambaran Umum Komunitas Lokasi Praktikum	54
3.1.1.	Sejarah Desa Babatan	54
3.1.2.	Kondisi Geografis.....	55
3.1.3.	Kondisi Demografis.....	56
3.1.4.	Kondisi Ekonomi dan Pembangunan.....	56
3.1.5.	Perangkat Desa Babatan.....	57
3.2.	Program/Layanan Yang diberikan Komunitas	59

3.3. Profil Penerima Program Layanan Komunitas	61
BAB IV PELAKSANAAN INTERVENSI KOMUNITAS	62
4.1. Tahap Membangun Relasi (<i>Dialog</i>)	62
4.1.1. Kegiatan Silaturahmi Bersama Kepala Seksi Pelayanan dan Sekertaris Desa	62
4.1.2. Kegiatan Silaturahmi Dengan RT, RW dan Karang Taruna	62
4.2. Tahap Asesmen (<i>Discovery</i>)	63
4.2.1. Melakukan kegiatan <i>Community Meeting</i> dengan menggunakan tools MPA (<i>Method Partisipatory Assesment</i>) dan SLA (<i>Social Livelihood Assesment</i>).....	63
4.3. Tahap Rencana Intervensi (<i>Discovery</i>)	64
4.3.1. Perencanaan Program	64
4.3.2. Pembentukan TKM (Tenaga Kerja Masyarakat)	68
4.4. Tahap Intervensi (<i>Development</i>)	69
4.4.1. Penyuluhan Kepada Penyandang Disabilitas Desa Babatan	69
4.4.2. Pembentukan Pengurus Kelompok Bababatan Peduli Disabilitas (GBPD)	69
4.4.3. Pembentukan Sekertariat Babatan Peduli Disabilitas.....	70
4.5. Tahap Evaluasi (<i>Development</i>)	71
4.5.1. Evaluasi Proses	71
4.5.2. Evaluasi Hasil.....	71
4.6. Tahap Terminasi dan Rujukan	72
4.6.1. Terminasi.....	72
4.6.2. Rujukan.....	72
BAB V PRAKTIK BAIK PRAKTIKUM KOMUNITAS	74
5.1. Integrasi/Keterkaitan/ Saling Melengkapi Metode <i>Community Work</i> dan Group Work serta Capaian terbaik dari Praktikum Komunitas.	74
5.2. Refleksi Praktikan (Pengalaman Praktikum untuk pengembangan Diri dan Pengembangan Profesional Calon Pekerja Sosial, Dilema Etik yang Dihadapi dan Solusinya).....	74

5.2.1.	Pengalaman Praktikum untuk Pengembangan Diri dan Pengembangan Profesional Calon Pekerjaan Sosial.....	74
5.2.2.	Dilema Etik yang dihadapi dan Solusi nya.....	76
5.3.	Keterlibatan (Peran) Praktikan Dalam Kegiatan Lokasi Praktikum Komunitas.....	76
5.3.1.	UMKM (Mercy Corps Indonesia).....	76
5.3.2.	Kegiatan Posyandu.....	78
5.3.3.	Kerja Bakti.....	79
5.3.4.	Siram Kebun.....	80
5.4.	Tantangan Praktikum Komunitas.....	81
5.4.1.	Dinamika Sosial dan Budaya.....	81
5.4.2.	Masalah yang Kompleks.....	82
5.4.3.	Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat.....	82
5.4.4.	Penguasaan Kompetensi Mahasiswa Praktikan.....	82
5.4.5.	Internal Kelompok.....	82
BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI		83
6.1.	Simpulan (Temuan temuan penting selama praktikum).....	83
6.2.	Rekomendasi (untuk pengembangan dan pemberdayaan organisasi dan masyarakat, implementasi kebijakan dan penyuluhan sosial).....	84
DAFTAR PUSTAKA.....		87
LAMPIRAN		88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Pendampingan Mengikuti Program Hari Disabilitas Internasional	65
Gambar 4.2. Membuat Capacity Building di rumah makan Cimuncang.....	65
Gambar 4.3. Penyuluhan Sosial Penyandang Disabilitas	66
Gambar 4.4. Struktur Kepengurusan	68

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kondisi Geografis Desa Babatan.....	55
Tabel 3.2. Kondisi Ekonomi di Desa Babatan	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. MKM Go Digitalisasi bersama mercy corps indonesia.....	88
Lampiran 2. Kunjungan ke Sekolah Luar Biasa Di babatan.....	88
Lampiran 3. Berdialog dengan aparat desa memberitahu maksud tujuan praktikum	89
Lampiran 4. Foto Bersama Setelah MPA Selesai.....	89
Lampiran 5. Berdialog dengan Karang taruna di desa babatan	90
Lampiran 6. Menyiram tanaman Bersama ibu ibu KWT	90
Lampiran 7. Kegiatan Melaksanakan Top Bersama Penyandang Disabilitas Desa Babatan	91
Lampiran 8. Kegiatan Supervisi Bersama Dosen Pembimbing	91
Lampiran 9. Penerimaan Hadiah dalam Kegiatan HDI	92
Lampiran 10. Bersama Para penyandang Disabilitas desa babatan yang mengikuti kegiatan Hari Disabilitas Internasional	92
Lampiran 11. Penyuluhan Tentang Hak hak Disabilitas	93
Lampiran 12. Kegiatan Loka karya Desa	93
Lampiran 13. Kegiatan Loka Karya Kecamatan.....	94
Lampiran 14. Peta Desa Babatan	94
Lampiran 15. Loka Karya Kabupaten.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktikum Komunitas

Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung menyelenggarakan Praktikum Komunitas sebagai bagian dari kontinum praktikum di Poltekesos, yaitu diawali dengan Praktikum Laboratorium, Praktikum Institusi dan diakhiri dengan Praktikum Komunitas. Kompetensi yang diharapkan dicapai mahasiswa meningkat untuk setiap praktikum. Mahasiswa diwajibkan meningkatkan kompetensinya pada Praktikum Laboratorium dalam penerapan nilai, pengetahuan dan keterampilan aras mikro, mezzo dan makro pada tahapan pertolongan engagement dan asesmen.

Pendekatan pembelajaran mahasiswa yang diterapkan adalah shadowing, tandem dan mandiri. Kompetensi yang diharapkan dicapai dari Praktikum Institusi adalah penguasaan dan penerapan nilai, pengetahuan, keterampilan serta mengimplementasikannya dalam seluruh tahapan pertolongan pekerjaan sosial, yaitu engagement, asesmen, rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan secara mandiri.

Praktikum Komunitas adalah penguasaan dan penerapan nilai, pengetahuan, keterampilan serta mengimplementasikannya dalam seluruh tahapan pertolongan pekerjaan sosial, yaitu tahap persiapan (preparation), membangun relasi (dialog), asesmen dan rencana intervensi (discovery), intervensi dan evaluasi (development), terminasi serta rujukan (continuity) secara mandiri, baik terhadap masyarakat, organisasi maupun kebijakan.

Praktikum Komunitas merupakan proses pembelajaran yang memadukan hasil belajar di kelas, pembekalan intensif sebelum praktikum, supervisi pra lapangan dan penerapan di lapangan pada konteks komunitas (masyarakat, organisasi, kebijakan).

Praktikum Komunitas dilakukan melalui penerapan kompetensi pekerjaan sosial aras makro pada tahapan pertolongan yaitu Tahap Persiapan (preparation), membangun relasi (dialog), asesmen dan penyusunan rencana intervensi (discovery), pelaksanaan intervensi dan evaluasi (development), hingga terminasi serta rujukan (continuity) ke Pemerintah Desa di tingkat Kabupaten.

1.2. Tujuan Umum Praktikum Komunitas

Tujuan Praktikum Komunitas terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus.

1) Tujuan Umum

Tujuan umum Praktikum Komunitas adalah mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan kompetensi pekerjaan sosial generalis pada aras makro pada semua tahapan pertolongan pekerjaan sosial mulai dari tahap persiapan (preparation), membangun relasi (dialog), asesmen dan penyusunan rencana intervensi (discovery), intervensi, dan evaluasi (development), sampai dengan terminasi dan rujukan (continuity).

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus Praktikum Komunitas adalah mahasiswa mampu:

- (1) Menerapkan prinsip-prinsip dasar, nilai dan etika pekerjaan sosial dalam seluruh pelaksanaan praktikum.
- (2) Memahami dan menerapkan tahapan pertolongan pekerjaan sosial generalis.
- (3) Mengidentifikasi dan memahami beberapa teori yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial pada aras makro serta regulasi yang relevan.
- (4) Memahami konteks praktikum dan sasaran praktikum di komunitas
- (5) Mempraktikkan nilai, pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial pada aras makro, khususnya pada tahap persiapan (preparation), membangun relasi (dialog), asesmen dan penyusunan rencana intervensi (discovery), intervensi, dan evaluasi (development), sampai dengan terminasi dan rujukan
- (6) (continuity) melalui penanganan masalah dan pengembangan potensi dan sumber komunitas.

1.3. Manfaat Praktikum Komunitas

Manfaat Praktikum Komunitas bagi mahasiswa adalah memperoleh pembelajaran dalam hal:

- 1) Diterapkannya prinsip-prinsip dasar, nilai dan etika pekerjaan sosial dalam seluruh pelaksanaan praktikum.
- 2) Dipahami dan diterapkannya tahapan pertolongan pekerjaan sosial generalis.
- 3) Teridentifikasi dan dipahaminya beberapa teori yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial pada aras makro serta regulasi yang relevan.
- 4) Dipahaminya konteks praktikum dan sasaran praktikum di komunitas.
- 5) Diterapkannya nilai, pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial pada aras makro, khususnya pada tahap persiapan (preparation), membangun relasi (dialog), asesmen dan penyusunan rencana intervensi (discovery), intervensi, dan evaluasi (development), sampai dengan terminasi dan rujukan (continuity).
- 6) terselesaikannya penanganan masalah atau pengembangan potensi/sumber komunitas di lokasi praktikum, melalui kegiatan penyuluhan sosial dan atau pemberdayaan masyarakat.

Manfaat praktikum bagi komunitas yang dijadikan lokasi praktikum adalah mendapatkan dukungan dan pendampingan dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan komunitas, mengembangkan potensi dan sumber komunitas, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran melalui penyuluhan serta pemberdayaan komunitas. Komunitas juga dapat mendokumentasikan dan mempublikasikan praktik baik yang dilakukan oleh mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Manfaat praktikum bagi Politeknik Kesejahteraan Sosial, Praktikum Komunitas menjadi wahana untuk menerapkan dan menguji efektivitas berbagai kompetensi yang telah diajarkan di kelas kepada mahasiswa; memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam berbagai program di komunitas serta menyediakan kesempatan untuk melakukan supervisi pekerjaan sosial bagi para dosen pembimbing dari kampus.

1.4. Sasaran

Sasaran kegiatan praktikum komunitas adalah sebagai berikut:

- 1) Warga masyarakat kelompok sasaran (*target group*) penerima manfaat upaya perubahan sosial, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Babatan yang memiliki orang penyandang disabilitas.
- 2) Berbagai elemen warga masyarakat (*stakeholder and shareholder*) sebagai kelompok berkepentingan (*interest group*) yang mana dalam hal ini
- 3) Kader Posyandu Desa Babatan
- 4) Desa Babatan
- 5) *Significant Others*

1.5. Sistematika Penulisan Laporan

Laporan ini disusun menggunakan tata cara dan sistematika penulisan berdasarkan Pedoman Praktikum:

BAB I : PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang Praktikum Komunitas, Tujuan dan manfaat Praktikum Komunitas, Sasaran, Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II : LANDASAN KONSEPTUAL PRAKTIKUM KOMUNITAS, memuat Metode Pekerjaan Sosial, Tahapan Pekerjaan Sosial, Peranan Pekerja Sosial dalam *Community Work* dan *Group Work*, Tinjauan konseptual yang terkait dengan kasus yang ditangani, dan Regulasi yang mendukung penanganan kasus.

BAB III : KONTEKS PRAKTIKUM KOMUNITAS, memuat Gambaran Umum Komunitas Lokasi Praktikum, Program/Layanan yang diberikan Komunitas, Profil Penerima Manfaat Program/Layanan Komunitas.

BAB IV : PENANGANAN KASUS, memuat proses dan hasil penanganan kasus yang dilakukan oleh praktikan yaitu Tahap Persiapan Sosial (*Social Preparation*), Tahap Membangun Relasi (*Dialog*), Tahap Asesmen (*Discovery*), Tahap Rencana Intervensi (*Discovery*), Tahap Intervensi (*Development*), Tahap Evaluasi (*Development*), Tahap Terminasi dan Rujukan (*Continuity*).

BAB V: PRAKTIK BAIK PRAKTIKUM KOMUNITAS, memuat Integrasi/ Keterkaitan/Saling Melengkapi Metode *Community Work* dan *Group Work* serta Capaian terbaik dari Praktikum Komunitas, Refleksi Praktikan (Pengalaman

Praktikum untuk pengembangan Diri dan Pengembangan Profesional Calon Pekerja Sosial, Dilema Etik yang Dihadapi dan Solusinya), Keterlibatan Praktikan dalam Kegiatan di Lokasi Praktikum Komunitas, dan Tantangan Praktikum Komunitas.

BAB VI : SIMPULAN DAN REKOMENDASI, memuat Simpulan (Temuan-temuan penting selama praktikum) dan Rekomendasi.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL PRAKTIKUM KOMUNITAS

2.1. Metode Pekerjaan Sosial

Metode pekerjaan sosial adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh pekerja sosial dalam melakukan intervensi untuk membantu individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Metode ini bertujuan untuk membantu klien dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi, memperbaiki kualitas hidup, serta mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Dalam konteks praktikum institusi, metode pekerjaan sosial yang digunakan mencakup dua pendekatan utama, yaitu pekerjaan sosial dengan individu/keluarga (*case work*) dan pekerjaan sosial dengan kelompok (*group work*).

2.1.1. Pekerjaan sosial dengan komunitas (*Community work*)

Glen (2015), mengemukakan bahwa secara konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep intervensi dalam kaitannya dalam praktik komunitas. Model intervensi ini sangat memperhatikan aspek masyarakat dimana didalamnya sangat terasa unsur pendidikan dan upaya mengubah suatu komunitas tersebut. Ellya Susilowati (2019) menjelaskan bahwa dasar dari pengembangan masyarakat adalah dialog yang dilakukan pada pertemuan masyarakat untuk mendalami, responsif dalam rangka membangun pemahaman, makna, dan tindakan kreatif bersama berkaitan dengan pengembangan Masyarakat.

Berdasarkan Permensos RI No 14 Tahun 2020 Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Praktik pekerjaan sosial dalam pengembangan masyarakat lokal (*locality development*) merupakan kegiatan praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi dan sumber yang dimiliki oleh masyarakat atau komunitas guna menangani permasalahan sosial yang dihadapinya (Lorraine M.Gutiérrezand Larry M. Gant, 2016).

2.1.1.1 Tujuan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Praktik pekerjaan sosial dalam pengembangan masyarakat lokal merupakan kegiatan intervensi praktik makro berbasis masyarakat yang difokuskan pada komunitas atau populasi masyarakat tertentu untuk tujuan pengembangan, pencegahan atau penanganan permasalahan sosial. Praktik pekerjaan sosial berbasis masyarakat berhubungan dengan aspek pelayanan sosial komunitas yang memfokuskan pada pendekatan ekologi dalam upaya untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran dan berkembangnya inisiatif masyarakat untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungannya.
- 2) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan serta mengembangkan dan mendayagunakan potensi dan sumber yang ada.
- 3) Memperoleh masukan tentang peluang-peluang pemanfaatan sistem sumber penyedia pelayanan yang dapat diakses untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- 4) Memperoleh masukan tentang peluang-peluang pengembangan kebijakan di tingkat lokal.

(Pedoman Praktikum berbasis Komunitas STKS Bandung, 2019)

2.1.1.2 Model Pendekatan

Model Pendekatan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas (*Community Work*) antara lain sebagai berikut:

1) *Model Locality Development (Community Development)*

Model ini memandang bahwa perubahan atau pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan sangat baik melalui suatu partisipasi aktif dari masyarakat lokal.

2) *Model Social Planning (Community Services)*

Model ini terutama menekankan pada suatu proses teknik dalam memecahkan masalah. Model ini meyakini bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat berhubungan dengan masalah lingkungan yang kompleks.

3) *Model Social Action (Community Action)*

Model ini memiliki pandangan bahwa di dalam masyarakat yang bersangkutan, terdapat suatu bagian/kelompok yang kurang beruntung (yang sering kali tertindas) yang perlu dibantu, diorganisasikan dalam rangka menekan struktur kekuasaan yang menindasnya.

2.1.1.3 Strategi dan Taktik Praktik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Beberapa strategi dan taktik-taktik praktik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas (*Community Work*) antara lain sebagai berikut:

1) Kolaborasi (*Collaboration*)

Strategi ini dilakukan ketika sistem sasaran sudah setuju (atau dapat diyakinkan untuk setuju) dengan program kegiatan. Sistem sasaran menyadari pentingnya perubahan dan bersedia mendukung perubahan tersebut, termasuk melalui pengalokasian sumber daya (seperti waktu, tenaga, atau dana). Taktiknya yaitu Implementasi *Capacity Building* (Pengembangan Kapasitas) yang terdiri atas:

- (1) Partisipasi yaitu mengundang dan melibatkan sistem sasaran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Partisipasi aktif mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab atas perubahan yang dilakukan. Contoh: Melibatkan masyarakat dalam musyawarah pembangunan daerah.
- (2) *Empowerment* (Pemberdayaan) yaitu memberikan pendidikan, pelatihan, atau sumber daya kepada sistem sasaran agar memiliki kemampuan untuk mendukung perubahan. Contoh: Memberikan pelatihan keterampilan kepada komunitas untuk meningkatkan pendapatan mereka.

2) Kampanye (*Campaign*)

Strategi ini diterapkan ketika sistem sasaran bersedia berkomunikasi dengan sistem kegiatan tetapi belum sepenuhnya setuju dengan perlunya perubahan. Mereka mungkin mendukung perubahan, tetapi tidak bersedia mengalokasikan sumber daya untuk mendukungnya. Taktiknya yaitu:

- (1) Pendidikan yaitu memberikan informasi dan membangun pemahaman kepada sistem sasaran mengenai pentingnya perubahan, sehingga mereka tergerak untuk mendukung perubahan. Contoh: Seminar atau sosialisasi mengenai dampak buruk merokok pada kesehatan.
- (2) Persuasi terdiri dari:
 - 1. Cooptation (Bergabung) yaitu mengajak individu atau kelompok kunci dari sistem sasaran untuk menjadi bagian dari kegiatan. Hal ini sering kali digunakan untuk membangun kepercayaan dan kemitraan. Contoh: Melibatkan tokoh masyarakat dalam kampanye sosial.
 - 2. Lobbying (Melobi) yaitu melakukan pendekatan langsung kepada pihak berwenang atau pengambil keputusan untuk mendapatkan dukungan mereka. Contoh: Mengajukan proposal kepada pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan lingkungan.
- (3) Meminta Bantuan Media Massa (Mass Media Appeal) yaitu menggunakan media massa (seperti televisi, radio, atau media sosial) untuk menyebarkan pesan dan mempengaruhi opini publik. Contoh: Kampanye di media sosial untuk mendukung pengurangan sampah plastik.

3) Kontes (*Contest*)

Strategi ini diterapkan ketika sistem sasaran secara aktif menentang perubahan yang diinginkan dan/atau menolak mengalokasikan sumber daya. Bahkan, mereka tidak bersedia membuka komunikasi untuk membahas alasan resistensinya. Taktik nya yaitu:

- (1) Bargaining dan Negotiation (Tawar-Menawar dan Perundingan) yaitu melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak yang mendukung perubahan dan pihak yang menentang. Contoh: Negosiasi antara serikat pekerja dengan perusahaan terkait kenaikan gaji.
- (2) Large-Group Action atau Aksi Komunitas, terdiri atas:
 - 1. Legal (Sah) yaitu mengorganisasi aksi dalam skala besar yang sesuai dengan hukum, seperti demonstrasi atau unjuk rasa damai. Contoh: Demonstrasi untuk menuntut kebijakan pengendalian harga bahan pokok.

2. Illegal (Melanggar Hukum) yaitu melibatkan aksi yang tidak sesuai dengan aturan, seperti tindakan anarkis atau vandalisme. Contoh: Pemblokiran jalan secara tidak sah sebagai bentuk protes.
- (3) Class Action / Active Lawsuit (Aksi Hukum Kelompok) yaitu melibatkan gugatan hukum yang diajukan oleh kelompok atau komunitas untuk menuntut perubahan atau keadilan. Contoh: Gugatan class action terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan.

2.1.1.4 Teknik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Beberapa teknik yang digunakan praktikan dalam melaksanakan praktikum komunitas di Desa Ciherang, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, yaitu:

1) *Community Involvement*

Teknik ini digunakan selama praktikum berlangsung terutama pada tahap persiapan. *Community Involvement* (CI) adalah proses meleburkan diri ke dalam masyarakat dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat di Desa Sekarwangi untuk membangun kepercayaan (*trust building*) antara praktikan dengan pemerintah desa, masyarakat dan stakeholders lainnya agar setiap kegiatan dalam proses praktikum mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa, masyarakat dan stakeholders lainnya.

2) *Transect Walk*

Teknik *transect walk* yaitu praktikan mengamati langsung kondisi lingkungan di Desa Sekarwangi. Praktikan melakukan *transect walk* untuk mengetahui wilayah desa baik dari kondisi wilayah, batas wilayah, keadaan, gambaran rutinitas dan perilaku masyarakat. Transect walk dilakukan pada tahap inisiasi sosial agar praktikan mendapatkan gambaran umum permasalahan dan potensi yang ada di Desa Ciherang. Praktikan juga dapat memperoleh gambaran mengenai interaksi sosial masyarakat di desa tersebut.

3) *Home Visit*

Praktikan melakukan kunjungan ke rumah untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat maupun masyarakat di desa untuk memperoleh informasi yang

diperlukan selama praktikum. Informasi yang diperoleh baik mengenai pemerintah desa, isu permasalahan maupun kebutuhan yang diperlukan masyarakat di Desa Ciherang. Kegiatan home visit ini untuk membangun kedekatan baik secara profesional maupun interpersonal dengan masyarakat.

4) *Methodology Participatory Assessment (MPA)*

Teknik *Methodology of Participatory Assessment (MPA)* merupakan pendekatan untuk menemukannya dan menggali masalah, kebutuhan dan kekuatan masyarakat secara partisipatif. Praktikan melakukan asesmen terhadap permasalahan dengan melibatkan masyarakat. Praktikan bersama dengan masyarakat menentukan permasalahan, prioritas masalah, dan potensi yang digunakan untuk menangani permasalahan tersebut.

Praktikan menerapkan kegiatan MPA dengan menggunakan media kertas untuk menyampaikan pendapat. Praktikan bertindak sebagai fasilitator dalam pengungkapan berbagai masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Penggunaan teknik ini menekankan bahwa masyarakat sadar akan keberadaan masalah dan sadar akan kebutuhannya penyelesaiannya

5) *Technology of Participation (ToP)*

Technology of Participation (ToP) adalah teknik perencanaan pengembangan masyarakat secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan rencana intervensi atau rencana tindak lanjut untuk menangani isu permasalahan yang menjadi prioritas agar tercapai kondisi yang diinginkan. Praktikan bertindak sebagai fasilitator untuk memperoleh pendapat dan aspirasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar. Praktikan mendapatkan gambaran umum program yang akan dirancang.

Praktikan bersama masyarakat menyusun nama program, bentuk kegiatan, tujuan, sasaran, pelaksana, waktu, pelaksana, sumber dana, dan indikator keberhasilan. Rencana ini merupakan pedoman dan langkah-langkah praktik intervensi yang akan dilakukan bersama masyarakat. Kegiatan ToP yang dilakukan oleh praktikan bersama dengan kelompok kepentingan serta kelompok sasaran

dalam pembahasan permasalahan serta perumusan perencanaan intervensi permasalahan yang menjadi fokus praktikan.

2.1.1.5 Pengetahuan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Pengetahuan Pekerjaan Sosial dengan Komunitas mencakup landasan teori, konsep, keterampilan, dan pendekatan yang membentuk dasar pengetahuan untuk menjalankan intervensi sosial pada tingkat komunitas. Berikut pengetahuan yang harus dimiliki pekerja sosial dalam praktik dengan komunitas:

- 1) Pengetahuan tentang keterampilan dasar, menengah dan mahir dalam praktik pekerjaan sosial baik pada aras makro maupun mezzo.
- 2) Pengetahuan tentang tahap pertolongan pekerjaan sosial pada aras makro (dialogue, discovery dan development).
- 3) Pengetahuan tentang komunitas (profil dan keberfungsian masyarakat, organisasi dan kebijakan terutama kebijakan pemerintahan desa dan pemerintahan daerah) di lokasi praktikum.
- 4) Pengetahuan tentang tipe kelompok, komunikasi dengan kelompok, Praktik Pekerjaan Sosial dengan Kelompok.
- 5) Pengetahuan tentang sasaran intervensi pekerjaan sosial komunitas (masyarakat, organisasi dan kebijakan).
- 6) Pengetahuan untuk menerapkan keterampilan dan teknologi (teknik) dalam setiap tahapan proses penanganan masalah maupun peningkatan potensi dan sumber komunitas, serta menerapkan keterampilan dalam pemberdayaan dan penyuluhan sosial.
- 7) Aplikasi praktis dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai untuk meningkatkan keberfungsian organisasi, masyarakat dan kebijakan.
- 8) Pengetahuan tentang Pemberdayaan, Penyuluhan Sosial serta Pengembangan Masyarakat

2.1.1.6 Keterampilan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Keterampilan praktik pekerjaan sosial dengan komunitas, yaitu keterampilan yang diperlukan untuk melakukan intervensi sosial atau pekerjaan sosial dalam skala

besar, seperti pada tingkat komunitas, masyarakat, atau organisasi. Berikut adalah penjelasan rinci:

1) Komunikasi Personal

Kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan individu atau kelompok di masyarakat, baik secara verbal maupun non-verbal, untuk membangun hubungan yang positif. Contoh: Mengadakan diskusi dengan pemimpin masyarakat.

2) Memotivasi, Memberi Semangat, dan Melakukan Aktivitas

Kemampuan untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan yang dirancang untuk perubahan atau pembangunan. Contoh: Menginspirasi warga untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan.

3) Berkelompok dan Mengadakan Pertemuan

Keterampilan untuk membentuk kelompok masyarakat dan menyelenggarakan pertemuan yang produktif guna membahas isu atau solusi bersama. Contoh: Mengadakan pertemuan kelompok tani untuk membahas teknik pertanian modern.

4) Pendidikan Masyarakat

Memberikan informasi atau pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan mereka. Contoh: Sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan sampah.

5) Presentasi di Masyarakat

Kemampuan menyampaikan informasi kepada audiens secara jelas dan menarik untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan. Contoh: Memberikan presentasi tentang dampak perubahan iklim kepada warga.

6) Menyusun Struktur dan Proses Penggalan Sumber Masyarakat

Mengorganisasi masyarakat untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif. Contoh: Membantu komunitas menyusun rencana penggunaan lahan untuk usaha ekonomi produktif.

7) Fasilitasi Kelompok

Kemampuan memimpin dan memandu diskusi kelompok agar berjalan efektif, menghasilkan solusi, atau mencapai tujuan bersama. Contoh: Memfasilitasi kelompok ibu rumah tangga untuk membuat koperasi simpan pinjam.

8) Negosiasi, Perantara, dan Mengembangkan Jaringan Kerja

Kemampuan untuk melakukan negosiasi, menjadi penghubung antar pihak, dan membangun jaringan kerja sama yang mendukung. Contoh: Menjembatani masyarakat dengan pemerintah untuk mendapatkan akses program bantuan.

9) Menulis (Laporan, Publikasi, dll.)

Keterampilan menulis laporan, artikel, atau materi lainnya untuk mendokumentasikan kegiatan dan mempublikasikan informasi penting. Contoh: Membuat laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

10) Bekerja dengan Media

Kemampuan menggunakan media massa atau media sosial untuk menyebarkan informasi atau membangun opini publik. Contoh: Membuat kampanye media sosial untuk mendukung pengurangan limbah plastik.

11) Memecahkan Konflik, Negosiasi, dan Mediasi

Kemampuan mengidentifikasi dan menangani konflik di masyarakat secara efektif melalui negosiasi atau mediasi. Contoh: Menengahi konflik antara kelompok nelayan dan perusahaan tambang.

12) Representasi dan Advokasi

Bertindak sebagai wakil masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan mereka, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Contoh: Mengadvokasi kebijakan yang mendukung hak-hak Perempuan.

13) **Pembiayaan Sosial**

Keterampilan dalam mencari, mengelola, dan mengalokasikan sumber dana untuk mendukung program sosial. Contoh: Menggalang dana untuk membangun infrastruktur air bersih di desa.

14) **Manajemen Waktu dan Informasi**

Kemampuan mengelola waktu dan informasi dengan baik untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efisien. Contoh: Membuat jadwal kegiatan proyek pemberdayaan masyarakat.

15) **Pemasaran dan Promosi**

Kemampuan memasarkan atau mempromosikan program atau kegiatan sosial kepada masyarakat untuk menarik perhatian dan dukungan. Contoh: Memasarkan produk UMKM hasil pemberdayaan masyarakat.

16) **Mengevaluasi Program Secara Efektif**

Keterampilan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan dampak program untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai. Contoh: Menyusun laporan evaluasi akhir proyek pembangunan.

17) **Riset atau Penelitian**

Kemampuan melakukan riset untuk memahami kebutuhan masyarakat atau mengevaluasi kebijakan yang sedang berjalan. Contoh: Melakukan survei tentang tingkat kemiskinan di suatu daerah.

2.1.2. Pekerja Sosial dengan Kelompok (*Group Work*)

Wibowo (2017) menyatakan, metode kerja kelompok dalam konteks pekerjaan sosial adalah praktik yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi sosial individu melalui penggunaan kelompok sebagai media. Praktik ini sering digunakan untuk membantu klien yang menghadapi masalah. Keunggulan dari metode ini terletak pada penerapan prinsip universalitas, rekonstruksi kognitif, penerimaan, dan altruisme, yang membuat klien merasa nyaman dan diterima. Dengan demikian, mereka lebih mampu

mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dan memberikan dukungan serta saran kepada anggota kelompok lainnya.

Metode ini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu untuk berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada penyelesaian masalah pribadi dan pengembangan sosial yang lebih baik.

2.1.2.1 Tujuan

Tujuan metode intervensi pekerjaan sosial dengan kelompok adalah:

- 1) Memperkuat pengembangan dan adaptasi sosial individu di dalam sebuah kelompok secara sukarela.
- 2) Penggunaan metode kelompok dalam kegiatan terapi individu ini berasosiasi dengan perkembangan kemampuan individu untuk berperilaku sesuai dengan harapan lingkungan sosial.
- 3) Mendorong perkembangan kapasitas individu secara maksimal dan mendukung ke arah relasi antara individu dengan masyarakat yang menyenangkan. Tujuan lain dari metode pekerjaan sosial dengan kelompok adalah untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan anggota kelompok dan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.2.2 Tipe-tipe Kelompok

Berikut beberapa tipe kelompok untuk kepentingan terapi berdasarkan tujuannya:

- 1) Social Conversation (Percakapan Sosial)

Kelompok percakapan sosial memiliki karakteristik yaitu: Pekerja Sosial dan klien membahas topik untuk didiskusikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok.

- 2) Kelompok Rekreasi/*Skill Building*

Kelompok Rekreasi/*Skill Building* disebut juga sebagai informal recreational group atau Skillbuilding recreational group, menawarkan kegiatan-kegiatan yang

bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dan melatih keterampilan tertentu. Kegiatan dapat bersifat fisik dengan memanfaatkan perlengkapan yang telah tersedia. Pada kelompok keterampilan agak berbeda dengan kelompok rekreasional yang bertujuan untuk menguasai keterampilan tertentu.

3) Kelompok Edukasi

Kelompok edukasi bertujuan untuk membantu anggota kelompok mempunyai pengetahuan dan mempelajari keahlian tertentu. Aktivitas kelompok ini membutuhkan pendidik yang ahli dalam menguasai pengetahuan atau keahlian yang akan diajarkan. Pekerja sosial perlu bekerja sama dengan profesional untuk meningkatkan proses transfer pengetahuan dan keahlian anggota kelompok.

4) Kelompok Tugas

Kelompok Tugas bertujuan untuk membangun sifat bertanggung jawab dari masing-masing anggota kelompok. Melalui tugas yang diberikan, anggota kelompok dilatih dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tugas yang diberikan pekerja sosial dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif anggota kelompok.

5) *Self-Help Group*

Self-Help Group ditujukan untuk membantu individu mengatasi permasalahan hidupnya, saling dukung dilakukan dengan cara memberikan testimoni dan pengakuan. Umumnya dalam bentuk “direct service” dengan memberikan pertolongan langsung kepada setiap anggota kelompok yang menghadapi masalah.

6) Kelompok Sosialisasi

Kelompok Sosialisasi bertujuan untuk membantu anggota kelompok mengembangkan sikap dan perilaku yang lebih dapat diterima oleh lingkungan sosial. Jenis keterampilan sosial yang dikembangkan meliputi: meningkatkan rasa percaya diri, merencanakan masa depan.

2.1.2.3 Teknik dan Keterampilan dalam *Group Work*

Keterampilan dan teknik yang harus dimiliki seorang Pekerja Sosial dalam melaksanakan metode intervensi *Group Work* yaitu:

- 1) Keterampilan membangun komunikasi dan relasi dengan kelompok (Kontak awal, membangun kontrak).
- 2) Keterampilan menggunakan *tools*: asesmen kebutuhan kelompok, asesmen menentukan tipe kelompok, asesmen perubahan perilaku anggota kelompok, asesmen proses kelompok, asesmen kekompakan kelompok, asesmen *leadership function analysis*, asesmen *team climate questionnaire*, asesmen *people skill inventory*.
- 3) Keterampilan menetapkan tipe kelompok sesuai kebutuhan klien dan memilih teknik-teknik kelompok sesuai tipe kelompok.

2.2 Tahapan dalam Proses Pekerjaan Sosial

Tahapan atau langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam memberikan layanan kepada individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan klien.

2.2.1 Membangun Relasi (*Dialog*)

Membangun relasi merupakan tahap awal dalam pekerjaan sosial di mana pekerja sosial membangun hubungan positif dengan klien. Hubungan yang baik sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan kenyamanan, sehingga klien merasa terbuka untuk berbagi masalahnya. Menurut Zastrow (2019), membangun relasi adalah langkah penting karena keberhasilan intervensi sangat bergantung pada hubungan kerja antara pekerja sosial dan klien. Dalam proses ini, pekerja sosial menunjukkan empati, kesabaran, dan keterampilan komunikasi untuk membangun koneksi emosional dengan klien.

Dialog adalah proses yang berisi rangkaian kegiatan dalam membangun relasi dengan masyarakat dan *stakeholder/shareholder* untuk persiapan kerjasama, mengembangkan kepercayaan masyarakat, memaknai tantangan, serta menentukan arah kegiatan yang akan dilakukan praktikan pada praktik komunitas.

Pada tingkat makro, membangun relasi melibatkan pekerja sosial yang menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat, organisasi, lembaga, atau pemangku kepentingan lain. Proses ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan membangun kepercayaan dalam kolaborasi. Kegiatan dalam tahap ini meliputi:

1) Persiapan Sosial untuk bekerjasama (*Preparing to work together*)

Pengenalan diri serta pengenalan warga merupakan inti dari tahap ini. Pada tahap ini praktikan mulai masuk ke dalam komunitas untuk sebanyak mungkin memperkenalkan apa maksud dan tujuan kehadirannya dalam masyarakat. Pelibatan diri dalam aktivitas-aktivitas interaksi masyarakat, pertemuan-pertemuan Desa Babatan merupakan strategi yang dapat dilakukan pada tahap ini.

2) Pembentukan dan pengembangan rasa saling percaya (*trust building*) dan pengembangan partnership (*developing partnership*).

Trust Building dapat dilakukan melalui strategi Kontak sosial, komunikasi dan Interaksi serta pembiasaan.

3) Pemaknaan tantangan-tantangan (*articulating challenges*)

Kepercayaan serta partnership tidak akan bertahan tanpa tujuan yang jelas. Tujuan akan terdefinisikan dengan jelas melalui penelusuran tantangan yang dihadapi bersama.

2.2.2 Asesmen (Discovery)

Asesmen yaitu proses pengumpulan informasi untuk memahami kebutuhan, masalah, dan sumber daya masyarakat atau sistem yang lebih luas. Asesmen di aras makro berfokus pada pengumpulan informasi untuk memahami masalah sosial dalam konteks sistem atau komunitas. Hal ini melibatkan analisis data, studi kebijakan, survei, atau konsultasi dengan kelompok masyarakat.

Menurut Kirst-Ashman dan Hull (2015), asesmen makro mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat, hambatan struktural, serta sumber daya yang tersedia untuk mendukung perubahan sosial. Asesmen juga mencakup evaluasi kebijakan yang ada dan dampaknya terhadap kelompok rentan. Proses dalam tahap asesmen ini harus

berbasis data dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan relevan dan akurat. Kegiatan dalam tahap ini meliputi:

1) Penggalian sumber daya (*Exploring Resource Systems*)

Upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menjelajahi, menggali, menemukan sumber daya yang ada dalam masyarakat (aset komunitas), baik sumber daya alam (*natural capital*), sumber daya manusia (*human capital*), sumber daya fisik (*fisical capital*), sumber daya sosial (*social capital*) dan sumber daya finansial (*financial capital*). Kegiatan ini dilakukan melalui pemetaan (*social mapping*), dan Teknik yang digunakan adalah pemetaan aset kehidupan berkelanjutan (*Sustainability Lifelihood Aset/SLA*), *Participatory Rural Appraisal* (PRA), Observasi, studi dokumentasi, wawancara, dll.

2) Analisis kemampuan dan daya dukung sumber daya (*Analyzing Resource Capabilities*)

Analisis pada intinya merupakan suatu aktivitas memahami yang dilakukan dengan cara “mengurai”, yaitu membagi kesatuan ke dalam bagian-bagian kecil yang mempermudah pemahaman, “Mencari relevansi”, yaitu mencari hubungan antara bagian satu dengan bagian lain, serta “mengkaitkan”, yaitu menghubungkan bagian internal dengan faktor eksternal yang ada.

2.2.3 Rencana Intervensi (Discovery)

Rencana intervensi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan guna memilih strategi terbaik dari sejumlah strategi yang ada untuk menyelesaikan masalah klien. Perencanaan intervensi ini sebagai lanjutan dari hasil asesmen. Proses praktik dalam perencanaan intervensi, adalah proses berkelanjutan yang melibatkan semua masyarakat untuk mengambil keputusan dalam mencapai tujuan atau perubahan yang diinginkan.

Tahap ini melibatkan penyusunan rencana strategis untuk menciptakan perubahan di tingkat sistem atau komunitas. Rencana intervensi di aras makro sering kali mencakup perumusan kebijakan, program sosial, atau strategi advokasi. perencanaan intervensi di aras makro harus melibatkan partisipasi berbagai

pemangku kepentingan, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan sektor swasta, untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

1) Membentuk tim (team building)

Tim merupakan kelompok yang terdiri dari banyak orang yang memiliki kemauan, semangat, dorongan masing-masing, akan tetapi memiliki kesatuan arah yang sama. Masing-masing anggota komunitas memiliki keunikan tersendiri serta kekuatan yang berbeda-beda. Perbedaan ini disatukan oleh arah dan tujuan bersama.

2) Merencanakan dan Menentukan intervensi (framing solutions)

Beraneka ragam alternatif solusi. Kebersamaan warga dilakukan terus menerus untuk saling berbagi pengalaman dan pemikiran, yang akhirnya membentuk pilihan yang ditetapkan bersama sebagai solusi yang disepakati. Pilihan solusi ini harus dibingkai atau diwujudkan dalam suatu pernyataan lugas dan ditampilkan sebagai milik bersama. Pernyataan bersama atas solusi ini harus selalu teringat dan “terpatri” dalam pikiran warga sebagai patokan yang harus selalu memandu langkah kerja warga mencapai tujuan yang dikehendaki.

3) Memperkuat motivasi kerjasama (strengthening energy to work together)

Pemahaman antar warga satu sama lain (Mutual understanding) tentang kebersatuan (Sense of “Us”), kesepakatan bersama (Mutual Agreement), perasaan saling memiliki antar warga (Sense of Belonging), merupakan instrumen untuk menggerakkan kekuatan (Instrument for Mobilization) kerjasama dalam suatu jaringan kerja untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, pekerja sosial masyarakat perlu menjalin hubungan dengan beraneka ragam bentuk kesatuan aktivitas bersama yang dapat saling menguatkan (*mutual understanding, mutual agreement, sense of us, serta sense of belonging*), serta mengembangkan modal sosial.

2.2.4 Intervensi (Development)

Intervensi pada tingkat makro melibatkan pelaksanaan strategi yang telah direncanakan untuk menciptakan perubahan sosial, ekonomi, atau politik. Contohnya adalah pelaksanaan program pengembangan masyarakat, advokasi kebijakan, atau

kampanye sosial. intervensi makro dapat berupa advokasi untuk mengubah kebijakan publik, membangun kapasitas komunitas, atau menciptakan jaringan kolaborasi antar organisasi. Netting et al. (2017) menambahkan bahwa pekerja sosial di aras makro sering bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau advokat dalam mengimplementasikan intervensi yang melibatkan banyak pihak. Kegiatan dalam tahap ini meliputi:

- 1) Mengaktifkan dan menguatkan interaksi sosial (*activating social interaction*) antar kelompok atau kesatuan-kesatuan sosial.

Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan, komunikasi, diskusi, perbincangan, maupun aksi-aksi bersama lainnya yang mengarah pada pengembangan masyarakat.

- 2) Mengaktifkan dan menggerakkan sumber daya (*activating resource system*)

Beberapa permasalahan terkait dengan pemanfaatan sistem sumber (seperti yang telah terurai pada tahap sebelumnya) perlu dihilangkan atau dikurangi sedemikian rupa agar orang yang membutuhkan dapat terhubung dengan sumber yang ada. Mobilisasi juga memerlukan “*Trust*” antara pelaksana sistem sumber dengan pihak yang membutuhkan. Dengan demikian “*Trust*” juga harus dikembangkan dengan kuat.

- 3) Memperluas peluang (*expanding opportunities*)

Memperluas peluang atau penggalian dan pengkajian sumber daya dengan baik, penentuan tujuan, serta perencanaan secara lengkap dan detail akan memperluas peluang atau kemungkinan-kemungkinan dalam pemecahan masalah maupun pencapaian hasil. Pengembangan Jaringan / modal sosial merupakan salah satu cara untuk memperluas peluang.

2.2.5 Evaluasi (Development)

Evaluasi di aras makro adalah proses menilai keberhasilan dan dampak dari intervensi yang telah dilakukan. Evaluasi ini mencakup analisis apakah tujuan yang telah direncanakan tercapai, apakah pendekatan yang digunakan efektif, serta dampaknya terhadap komunitas. Rossi, Lipsey, dan Freeman (2019), menyatakan evaluasi di tingkat makro harus berbasis data yang valid dan reliabel, menggunakan

metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang hasil intervensi.

Evaluasi makro juga melibatkan komunitas untuk memahami bagaimana mereka merasakan dampak dari program atau kebijakan yang dilaksanakan. Proses ini penting untuk membangun keberlanjutan. Kegiatan dalam program ini meliputi Pemahaman akan keberhasilan yang telah dicapai (*recognizing success*). Keberhasilan yang telah dicapai yang terbingkai dalam suatu kerangka yang terdokumentasi dengan baik meningkatkan rasa percaya diri warga atas hasil dan proses kerja yang telah dilakukan, yang selanjutnya akan menguatkan keyakinan dalam diri warga bahwa mereka mempunyai kemampuan.

Keberhasilan yang dicapai ini terbagi ke dalam beberapa tahapan kerja yang sesuai dengan tujuan-tujuan jangka pendek. Hal ini dilakukan melalui evaluasi terhadap proses yang dilakukan.

2.2.6 Terminasi dan Rujukan (Community)

Terminasi adalah tahap penyelesaian hubungan formal antara pekerja sosial dan komunitas setelah intervensi selesai. Terminasi harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa komunitas siap untuk mandiri dan melanjutkan upaya yang telah dimulai. Rujukan melibatkan mengarahkan komunitas ke sumber daya atau layanan lain yang dapat membantu mereka setelah terminasi, jika diperlukan. Ini memastikan kontinuitas dukungan dan bantuan bagi komunitas.

Terminasi di aras makro adalah tahap akhir di mana pekerja sosial menyelesaikan program atau hubungan kerja setelah tujuan tercapai. Namun, pekerja sosial harus memastikan bahwa komunitas atau sistem memiliki kapasitas untuk melanjutkan perubahan secara mandiri. Netting et al. (2017) menyatakan terminasi harus dilakukan secara bertahap dan direncanakan dengan baik, termasuk memberikan pelatihan atau pengalihan tanggung jawab kepada komunitas atau lembaga. Selanjutnya menekankan bahwa jika diperlukan, pekerja sosial dapat

merujuk komunitas ke lembaga lain yang mampu memberikan dukungan lanjutan, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga.

2.3 Peran Pekerja Sosial dalam *Community Work* dan *Group Work*

Pekerja sosial memainkan peran yang sangat penting dalam *community work* (pekerjaan komunitas) dan *group work* (pekerjaan kelompok) untuk memfasilitasi perubahan sosial, mendukung kesejahteraan individu, dan mengembangkan kapasitas kolektif dalam masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai peran pekerja sosial dalam kedua konteks tersebut:

2.3.1 Peran Pekerja Sosial dalam *Community Work*

Peran praktik pekerjaan sosial pada aras makro, yaitu level yang lebih luas dan sistemik dalam masyarakat. Pada tingkat makro, pekerja sosial berfokus pada perubahan sosial yang menyentuh kebijakan publik, struktur sosial, serta institusi yang ada dalam masyarakat. Mereka tidak hanya bekerja dengan individu atau kelompok, tetapi juga berupaya memengaruhi dan merancang kebijakan, program, serta intervensi yang dapat memberikan dampak lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut beberapa peran Pekerjaan Sosial aras Makro:

1) Peranan Fasilitatif

Peran pekerja sosial sebagai fasilitator sangat penting dalam membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk mengatasi masalah mereka, mencapai tujuan, dan membangun hubungan yang lebih baik dalam lingkungan sosial mereka. Pekerja sosial yang berperan sebagai fasilitator menggunakan berbagai keterampilan dan pendekatan untuk mendukung perubahan sosial yang positif. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai peran fasilitatif pekerja sosial:

(1) Animasi Sosial

Animasi Sosial merujuk pada upaya pekerja sosial untuk menggerakkan dan memotivasi individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau komunitas. Ini mencakup menciptakan kesadaran tentang masalah sosial yang ada dan merangsang individu untuk terlibat dalam perubahan sosial. Pekerja sosial

berperan sebagai penghubung antara anggota komunitas dengan peluang atau aktivitas yang dapat memberdayakan mereka. Contoh: Seorang pekerja sosial di komunitas yang rawan kemiskinan mungkin mengadakan kegiatan diskusi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan atau kesehatan, sambil mendorong partisipasi aktif anggota masyarakat untuk berperan dalam perbaikan kondisi mereka.

(2) Mediasi dan Negosiasi

Pekerja sosial bertindak sebagai perantara untuk membantu menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu antara individu, kelompok, atau bahkan antara masyarakat dan pemerintah. Mediasi bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama dan menemukan solusi yang saling menguntungkan, sementara negosiasi melibatkan diskusi antara dua pihak yang berlawanan untuk mencapai kesepakatan. Contoh: Dalam kasus perselisihan antara kelompok pemuda dan polisi di suatu komunitas, pekerja sosial akan berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif, menyelesaikan ketegangan, dan mencapai kesepakatan mengenai aturan dan tindakan bersama yang bisa diterima oleh semua pihak.

(3) Dukungan (Support)

Dukungan yang diberikan oleh pekerja sosial dapat berupa dukungan emosional, praktis, maupun informasi yang diperlukan oleh individu atau kelompok yang sedang menghadapi kesulitan. Pekerja sosial tidak hanya memberikan dukungan langsung, tetapi juga membantu membangun jaringan dukungan yang lebih luas di dalam komunitas, seperti keluarga, teman, atau kelompok sosial lainnya. **Contoh:** Seorang pekerja sosial yang bekerja dengan korban kekerasan rumah tangga mungkin akan menyediakan dukungan emosional langsung serta membantu mereka mengakses sumber daya lain seperti tempat perlindungan atau layanan hukum yang tersedia.

(4) Membangun Konsensus

Membangun Konsensus adalah upaya untuk mencapai kesepakatan atau pemahaman bersama di antara kelompok yang memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda. Pekerja sosial berperan sebagai fasilitator dalam proses ini dengan mendorong komunikasi yang terbuka, mengurangi ketegangan, dan membantu semua pihak menemukan titik temu. Contoh: Dalam sebuah komunitas yang sedang merencanakan proyek pengembangan, pekerja sosial akan memfasilitasi diskusi antara berbagai kelompok untuk mencapai konsensus tentang tujuan dan cara pelaksanaan proyek, sehingga semua pihak merasa terlibat dan setuju.

(5) Fasilitasi Kelompok

Fasilitasi Kelompok adalah kemampuan pekerja sosial untuk memimpin atau memandu sebuah kelompok agar berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Ini mencakup merancang dan memimpin pertemuan, serta membantu kelompok mengelola dinamika interaksi, membangun komunikasi yang sehat, dan memastikan bahwa semua suara didengar. Fasilitasi juga melibatkan pemberian arahan yang jelas, serta membantu kelompok untuk tetap fokus pada tujuan bersama. Pekerja sosial yang memfasilitasi kelompok pendukung untuk orang-orang yang mengalami kecanduan akan mengarahkan diskusi, membantu anggota kelompok untuk berbagi pengalaman, dan memberikan dukungan emosional yang mendorong proses pemulihan.

(6) Pemanfaatan Keterampilan dan Sumber Daya

Pekerja sosial berperan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan keterampilan serta sumber daya yang ada di dalam komunitas atau individu untuk menyelesaikan masalah. Ini termasuk mengenali potensi yang belum tergali, seperti keterampilan khusus anggota komunitas, dan membantu mereka mengakses sumber daya yang dapat mendukung pencapaian tujuan bersama. Contoh: Dalam proyek pemberdayaan ekonomi di sebuah desa, pekerja sosial mungkin akan mengenali keterampilan kerajinan tangan yang dimiliki oleh anggota

komunitas dan membantu mereka mengakses pasar atau pelatihan yang lebih lanjut untuk meningkatkan pendapatan mereka.

(7) Organisasi

Pekerja sosial juga bertugas untuk mengorganisir kegiatan atau inisiatif yang melibatkan banyak pihak, baik itu dalam skala kecil maupun besar. Ini melibatkan perencanaan, pengaturan logistik, dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa semua berjalan dengan lancar dan tujuan dapat tercapai. Contoh: Dalam upaya memperkenalkan program kesehatan masyarakat, pekerja sosial mungkin mengorganisir pelatihan untuk petugas kesehatan lokal, mengoordinasikan dengan pemerintah daerah, serta bekerja dengan tokoh masyarakat untuk memastikan partisipasi aktif dari anggota komunitas.

(8) Komunikasi Personal

Pekerja sosial perlu memiliki kemampuan komunikasi personal yang baik, baik dalam bentuk berbicara, mendengarkan, maupun menulis. Keterampilan komunikasi ini sangat penting dalam membangun hubungan yang saling percaya antara pekerja sosial dengan individu atau kelompok yang mereka bantu. Pekerja sosial yang baik mampu mengomunikasikan ide, memberikan informasi, serta memotivasi orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau perubahan yang diinginkan. Contoh: Dalam menangani klien yang membutuhkan dukungan psikososial, pekerja sosial akan menggunakan keterampilan komunikasi untuk mendengarkan keluhan dan perasaan klien, memberikan umpan balik yang mendukung, serta memberikan informasi yang membantu klien memahami langkah-langkah selanjutnya.

2) Peranan Edukasional

Peran edukasional pekerja sosial sangat penting dalam proses pemberdayaan individu, kelompok, atau komunitas. Sebagai bagian dari pendekatan edukasional, pekerja sosial bertugas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial yang ada, serta memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku yang mendukung kesejahteraan bersama. Berikut

adalah penjelasan tentang peran edukasional pekerja sosial dalam menumbuhkan kesadaran, mengkonfrontasikan, menginformasikan, dan memberikan pelatihan:

(1) Menumbuhkan Kesadaran

Menumbuhkan Kesadaran adalah salah satu aspek kunci dalam pekerjaan sosial edukasional. Pekerja sosial berperan untuk meningkatkan pemahaman individu atau kelompok tentang masalah sosial yang ada, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun struktural. Kesadaran ini sangat penting agar orang-orang yang terlibat dapat lebih peka terhadap isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan mendorong mereka untuk mengambil langkah-langkah yang dapat mengatasi masalah tersebut. **Contoh:** Dalam komunitas yang terpapar pada masalah kesehatan mental, pekerja sosial akan menyelenggarakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang tanda-tanda depresi atau kecemasan, serta pentingnya dukungan sosial dan perawatan kesehatan mental.

(2) Mengkonfrontasikan

Mengkonfrontasikan dalam konteks pekerjaan sosial edukasional adalah pendekatan untuk mengajak individu atau kelompok untuk menghadapi kenyataan atau masalah yang mungkin mereka hindari atau tidak sadari. Pekerja sosial dengan cara yang sensitif dan empatik, mengajak orang untuk melihat masalah dari perspektif yang lebih luas, mengenali dampaknya, dan memotivasi mereka untuk bertindak. Mengkonfrontasi bukan berarti menyerang atau mengkritik, tetapi lebih kepada membuka ruang untuk refleksi dan diskusi yang konstruktif. **Contoh:** Seorang pekerja sosial yang bekerja dengan individu atau keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mungkin akan mengkonfrontasi mereka dengan kenyataan tentang kekerasan yang sedang terjadi, sekaligus membantu mereka melihat kemungkinan untuk keluar dari siklus kekerasan dengan memberikan alternatif dan dukungan.

(3) Menginformasikan

Menginformasikan adalah peran edukasional yang melibatkan penyampaian informasi yang relevan dan akurat kepada individu atau kelompok tentang masalah sosial tertentu, serta hak dan kewajiban mereka. Pekerja sosial tidak hanya

memberikan informasi dasar, tetapi juga membantu orang memahami informasi tersebut dalam konteks kehidupan mereka, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik dan informatif. Contoh: Pekerja sosial yang bekerja dengan orang-orang yang baru terdiagnosis HIV/AIDS akan memberikan informasi yang jelas tentang cara pencegahan, perawatan, hak-hak mereka, serta sumber daya yang tersedia untuk mendukung mereka, termasuk kelompok dukungan atau layanan kesehatan.

(4) Pelatihan (Training)

Pelatihan adalah bagian penting dari peran edukasional pekerja sosial, di mana mereka memberikan keterampilan praktis atau teknis yang dapat digunakan oleh individu atau kelompok untuk mengatasi tantangan atau mengembangkan potensi mereka. Pelatihan dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari keterampilan hidup (life skills), keterampilan sosial, hingga keterampilan teknis seperti keterampilan kerja atau pengelolaan sumber daya. Contoh: Pekerja sosial dapat mengadakan pelatihan keterampilan kerja untuk kelompok pemuda yang rentan terhadap pengangguran, seperti pelatihan komputer, keterampilan kewirausahaan, atau pelatihan untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi.

3) Peranan Representatif

Peran representatif pekerja sosial berkaitan dengan kemampuan mereka untuk mewakili kepentingan individu, kelompok, atau komunitas yang mereka layani di tingkat yang lebih luas. Pekerja sosial berfungsi sebagai jembatan antara klien atau kelompok yang terpinggirkan dengan berbagai sistem atau entitas yang lebih besar, seperti pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat umum. Dalam peran ini, mereka membantu memperjuangkan hak-hak klien, mempengaruhi kebijakan, serta mengakses berbagai sumber daya yang diperlukan. Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai aspek peran representatif pekerja sosial:

(1) Memperoleh Sistem Sumber Daya

Pekerja sosial sebagai perwakilan berperan dalam mengakses dan mengorganisasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan oleh individu atau kelompok yang mereka bantu. Sumber daya ini bisa berupa layanan sosial, bantuan keuangan, pendidikan, kesehatan, atau kesempatan pekerjaan. Pekerja sosial bertanggung jawab untuk mengenali berbagai sumber daya yang ada di masyarakat dan membantu klien atau komunitas untuk mengaksesnya, baik melalui jalur formal (lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah) maupun informal (jaringan komunitas). Contoh: Seorang pekerja sosial yang bekerja dengan keluarga miskin mungkin akan mencari dan mengakses program bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, atau pelatihan keterampilan kerja untuk anggota keluarga yang membutuhkan. Pekerja sosial ini juga akan menghubungkan mereka dengan lembaga-lembaga yang dapat mendukung perubahan kondisi sosial mereka.

(2) Advokasi

Advokasi adalah peran inti pekerja sosial sebagai representatif, di mana mereka memperjuangkan hak-hak individu atau kelompok yang terpinggirkan agar mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam masyarakat. Advokasi ini bisa dilakukan dalam bentuk mempengaruhi kebijakan, memperjuangkan hak-hak dasar klien, atau membantu klien mengakses layanan yang mereka butuhkan. Pekerja sosial bertindak sebagai suara bagi mereka yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berbicara atau diperhatikan. **Contoh:** Seorang pekerja sosial yang menangani kasus kekerasan berbasis gender akan melakukan advokasi dengan mengajukan permohonan untuk perlindungan hukum bagi korban, berjuang untuk perubahan kebijakan dalam pelayanan penanganan kekerasan, dan memastikan hak-hak korban dilindungi.

(3) Media Massa

Pekerja sosial dapat menggunakan media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial tertentu. Media massa, seperti televisi, radio, dan internet, dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk

mempengaruhi pandangan masyarakat umum, mengedukasi publik, dan menggalang dukungan untuk perubahan sosial. Sebagai representatif, pekerja sosial dapat menggunakan media untuk memperjuangkan kepentingan klien atau kelompok yang mereka wakili. Contoh: Pekerja sosial yang bekerja dengan komunitas difabel mungkin akan mengkampanyekan hak-hak mereka melalui media sosial atau iklan layanan masyarakat di televisi untuk mengubah pandangan publik dan mendukung kebijakan yang lebih inklusif.

(4) Hubungan Masyarakat (*Public Relations*)

Pekerja sosial juga memainkan peran dalam membangun hubungan dengan masyarakat luas untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang isu sosial yang dihadapi oleh individu atau kelompok yang mereka wakili. Hubungan masyarakat mencakup interaksi dengan media, organisasi, dan kelompok-kelompok lain untuk memperkenalkan masalah sosial dan mencari dukungan yang lebih besar dari publik atau pihak berwenang. Contoh: Dalam program rehabilitasi sosial bagi narapidana, pekerja sosial dapat bekerja sama dengan media dan organisasi masyarakat untuk mengubah stigma negatif terhadap mantan narapidana dan mempromosikan pentingnya reintegrasi sosial mereka ke dalam Masyarakat.

(5) Jaringan Kerja (*Networking*)

Pekerja Sosial membangun dan memelihara jaringan kerja yang luas adalah salah satu cara pekerja sosial bertindak sebagai representatif. Melalui jaringan ini, pekerja sosial dapat mengakses berbagai sumber daya, mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan menjalin kemitraan untuk meningkatkan efektivitas intervensi sosial. Jaringan kerja ini dapat mencakup berbagai sektor, seperti lembaga pemerintah, LSM, komunitas lokal, sektor kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. **Contoh:** Seorang pekerja sosial yang menangani masalah pengangguran di kalangan pemuda mungkin akan membangun jaringan kerja dengan perusahaan-perusahaan lokal, lembaga pelatihan keterampilan, dan organisasi komunitas untuk menciptakan peluang kerja atau program pelatihan yang relevan.

(6) Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman

Pekerja sosial sebagai representatif juga memiliki peran dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan sejawat, komunitas, dan organisasi lainnya. Dengan berbagi pengetahuan, pekerja sosial dapat memperkuat kapasitas kolektif dalam menghadapi masalah sosial, serta menciptakan solusi yang lebih efektif. Pengalaman yang dimiliki pekerja sosial dalam menangani berbagai isu sosial dapat menjadi sumber pembelajaran yang berharga bagi orang lain. Contoh: Pekerja sosial yang berpengalaman dalam menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat berbagi pengetahuan tentang intervensi yang efektif dengan kolega di bidang pendidikan atau psikologi, atau bahkan melalui seminar dan workshop untuk meningkatkan kapasitas pekerja sosial lainnya.

4) Peranan Teknikal

Peran teknikal pekerja sosial mencakup berbagai keterampilan dan tugas yang lebih bersifat praktis dan sistematis, yang berfokus pada penggunaan alat, teknik, dan metode untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menyampaikan informasi yang relevan. Dalam konteks ini, pekerja sosial tidak hanya berperan dalam memberikan layanan langsung kepada klien, tetapi juga dalam melaksanakan tugas administratif dan analitis yang mendukung pengelolaan layanan sosial yang efektif. Berikut adalah penjelasan mengenai peran teknikal pekerja sosial:

(1) Pengumpulan dan Analisis Data

Pekerja sosial sering kali terlibat dalam pengumpulan dan analisis data untuk mengidentifikasi masalah sosial, memahami kebutuhan klien, dan mengevaluasi dampak dari intervensi yang dilakukan. Data ini bisa berupa informasi demografis, kondisi sosial ekonomi, kesehatan, atau hasil dari program intervensi yang telah dilakukan. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui wawancara, survei, observasi, dan sumber data lainnya. **Contoh:** Pekerja sosial yang bekerja dengan keluarga rentan mungkin mengumpulkan data mengenai kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, serta kebutuhan psikososial untuk merancang intervensi yang tepat. Analisis data ini akan membantu pekerja sosial merumuskan program atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan klien.

(2) Penggunaan Komputer

Komputer dan teknologi informasi telah menjadi alat penting dalam pekerjaan sosial modern. Pekerja sosial menggunakan perangkat lunak dan aplikasi untuk mengelola data, melakukan analisis statistik, menyusun laporan, serta mengakses sumber daya online. Teknologi juga memungkinkan pekerja sosial untuk berkomunikasi dengan klien atau lembaga lain secara lebih efisien dan efektif. Contoh: Pekerja sosial mungkin menggunakan perangkat lunak manajemen kasus untuk melacak kemajuan klien, mengelola jadwal pertemuan, atau menggunakan aplikasi untuk memberikan konseling jarak jauh. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan basis data untuk menemukan informasi terkait dengan kebijakan atau program layanan sosial yang tersedia.

(3) Presentasi Lisan dan Tulisan

Kemampuan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan persuasif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, adalah salah satu peran teknikal yang sangat penting bagi pekerja sosial. Mereka perlu menyusun laporan tertulis yang komprehensif dan presentasi yang mudah dipahami oleh berbagai pihak, baik itu klien, kolega, manajer, atau pihak lain yang terlibat. Presentasi ini bisa mencakup hasil evaluasi, rekomendasi kebijakan, atau update perkembangan kasus. Contoh: Seorang pekerja sosial yang terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi akan menyiapkan presentasi lisan untuk audiens terkait, seperti sponsor atau pemerintah daerah, untuk menunjukkan keberhasilan program. Selain itu, pekerja sosial juga harus menyusun laporan tertulis yang menggambarkan dampak program dan rencana tindak lanjut.

(4) Manajemen

Pekerja sosial sering kali terlibat dalam kegiatan manajerial, baik dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, maupun program. Manajemen ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta evaluasi kegiatan atau proyek sosial. Pekerja sosial juga perlu memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan anggaran, waktu, dan standar kualitas yang ditetapkan. Contoh: Dalam sebuah organisasi yang menyediakan layanan

perlindungan anak, pekerja sosial yang memimpin tim mungkin bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan program layanan, mengatur anggaran, serta memastikan bahwa staf bekerja sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Mereka juga akan mengawasi implementasi program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

(5) Kontrol Sosial

Kontrol Sosial adalah peran teknis yang berkaitan dengan pengawasan terhadap perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat untuk memastikan bahwa mereka mematuhi norma dan aturan yang ada. Pekerja sosial memainkan peran penting dalam membantu masyarakat untuk mengelola ketegangan sosial dan mengatur perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima. Ini juga mencakup memastikan bahwa individu atau kelompok yang berisiko mendapatkan dukungan dan pembinaan yang diperlukan. Contoh: Seorang pekerja sosial yang bekerja dengan narapidana atau mantan narapidana berperan dalam memonitor dan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang ada, memberikan konseling untuk mengubah perilaku, serta bekerja dengan lembaga-lembaga

2.3.2 Peran Pekerja Sosial dalam *Group Work*

Peranan pekerja sosial dibedakan menurut tugas dan tanggung jawabnya (Ashman, Kirk Karen 2018) yaitu:

- 1) Konselor adalah seseorang yang membimbing klien dan membantu mereka dalam perubahan terencana atau proses pemecahan masalah. Contoh: bantuan yang diberikan kepada remaja bermasalah dalam mengambil keputusan menjalin pertemanan dan melakukan aktivitas seksual dengan mengidentifikasi alternatif dan mengevaluasi potensi yang dimiliki.
- 2) Edukator/pendidik adalah seseorang yang memberikan informasi dan mengajarkan keterampilan kepada orang lain. Sebagai contoh: Pekerja sosial mengajarkan kepada orangtua mengenai keterampilan pengasuhan anak.

- 3) Broker adalah orang yang menghubungkan sistem klien kepada sistem sumber yang dibutuhkan. Sebagai contoh Pekerja sosial merujuk klien yang membutuhkan kepada pusat rehabilitasi penyalahgunaan napza
- 4) Manajer kasus adalah seorang praktisi yang mengkoordinasikan layanan yang dibutuhkan dan yang disediakan oleh lembaga atau organisasi.
- 5) Mobilisator adalah seseorang yang mengidentifikasi dan mengumpulkan anggota masyarakat dan sumber daya untuk mengidentifikasi “kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi” dan “memberikan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat mereka”. Misalnya, seorang praktisi dapat mendorong warga masyarakat untuk bersatu dan memulai program pendidikan narkoba bagi anak-anak warga.
- 6) Mediator merujuk pada peran yang diambil oleh pekerja sosial untuk memfasilitasi komunikasi dan resolusi konflik antara individu atau kelompok. Mediator membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan atau pemahaman yang saling menguntungkan, dengan mendengarkan, mengarahkan diskusi, dan menciptakan suasana yang kondusif. Tugas mediator mencakup menjembatani perbedaan, mengurangi ketegangan, dan menemukan solusi bersama, sehingga proses penyelesaian masalah dapat berjalan lebih efektif.
- 7) Negosiator adalah seseorang yang bertindak sebagai perantara untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi jelas memihak salah satu pihak yang terlibat. Misalnya, seorang pekerja sosial di bidang kesejahteraan publik dapat bertindak atas nama kliennya untuk menegosiasikan manfaat yang lebih baik bagi mereka.
- 8) Fasilitator adalah seseorang yang memandu pengalaman kelompok. Misalnya, seorang praktisi menjalankan kelompok pendukung untuk wanita muda penderita bulimia.
- 9) Juru bicara adalah seseorang yang memiliki kewenangan berbicara atas nama orang lain.
- 10) Koordinator adalah seseorang yang mengkoordinasikan orang lain agar tetap bersama-sama dan mengelola kinerja mereka

- 11) Manager adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab secara administratif di lembaga pelayanan sosial atau sistem organisasi lainnya
- 12) Advokat adalah seseorang yang berbicara atas nama klien untuk mempromosikan perlakuan yang adil dan setara atau mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Misalnya, seorang pekerja sosial bertemu dengan pimpinan lembaga atas nama klien untuk mengubah kebijakan lembaga demi keuntungan klien.

2.4 Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumberdaya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan yang mulia, sebab, program ini tidak hanya membantu masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya secara mandiri, tetapi juga berpengaruh pada pembangunan nasional.

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan sebagainya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given.

Kemandirian disini yaitu tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun, memelihara kelangsungan hidupnya dan berpartisipasi menjaga lingkungan dimana mereka berada. Jadi secara garis besar pemberdayaan masyarakat merupakan proses menciptakan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk mampu secara mandiri mengatasi segala persoalan yang dihadapinya, dan berkuasa atas segala aspek yang terkait dengan kehidupannya.

2.4.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat berpusat pada masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. Proses tersebut dimulai dengan keterlibatan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi. Pakpahan et al., (2024) menyatakan pemberdayaan masyarakat membutuhkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dan merupakan salah satu model pemberdayaan masyarakat. Perusahaan harus berpegang pada prinsip 3P (keuntungan, masyarakat, dan bumi) dimana CSR selain mengejar keuntungan juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian alam. Maksud dilaksanakannya program pemberdayaan, antara lain: (1) memperbaiki aspek kelembagaan, (2) memperbaiki upaya pembangunan, (3) memperbaiki pemasukan masyarakat, (4) memperbaiki kehidupan, (5) memperbaiki kehidupan masyarakat, dan (6) memperbaiki kondisi lingkungan. Implementasi pemberdayaan bagi masyarakat pedesaan bisa dilaksanakan dalam program pembangunan pedesaan di bidang perekonomian, pendidikan, keagamaan, dan Kesehatan.

Pakpahan et al., (2024) menyatakan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan individu dan masyarakat yang mandiri. Beberapa perbaikan pemberdayaan, diantaranya:

1) Pendidikan (better education)

Pemberdayaan dibentuk dengan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan hendaknya tidak bersifat satu arah namun harus bersifat dua arah, tidak bersifat menggurui, pendidik harus bersifat sebagai fasilitator, sikap saling menghargai, proses belajar mengajar didasarkan atas pengalaman serta bersifat praktis.

2) Aksebilitas (better accessibility)

Perbaikan pada aspek ini perlu dilakukan karena akan memberikan kemudahan pada kegiatan pemberdayaan. Aksebilitas dilakukan dengan penyediaan bangunan, jalan, sumber informasi, inovasi, lembaga pemasaran yang akan mewujudkan kesempatan bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

3) Tindakan (better action)

Pemberdayaan dengan perbaikan tindakan dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pemantauan sehingga tindakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kedepannya menjadi lebih baik.

4) Kelembagaan (better institution)

Perbaikan kelembagaan diantaranya kemampuan berkomunikasi, pengembangan jejaring kemitraan untuk perubahan perilaku yang sesuai dengan nilai maupun adat masyarakat sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat di capai.

5) Usaha (better business)

Perbaikan usaha perlu di lakukan terus menerus di aspek layanan maupun produk. Kualitas pendidikan, asesabilitas, kelembagaan akan dapat memperbaiki usaha.

6) Perbaikan pendapatan (better income)

Perbaikan usaha akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

7) Lingkungan (better environment)

Lingkungan adalah hal yang sangat perlu di perhatikan dalam pemberdayaan masyarakat. Lingkungan yang bersih dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak membakarnya namun memilahnya yang organik dan non organik; diversifikasi tanaman; mengolah produk pertanian yang bernilai tambah dan menjalin komunikasi dengan semua lapisan masyarakat.

8) Kehidupan (better living)

Pemberdayaan akan merubah kehidupan masyarakat. Hidup yang lebih baik akan dimiliki masyarakat ketika masyarakat mandiri dan dapat dilihat dengan jelas terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat.

9) Masyarakat (better community)

Perbaikan dengan program yang terstruktur dengan baik akan menjadikan masyarakat mandiri.

2.4.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pakpahan et al., (2024) menyatakan hakikat pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kondisinya masih tertinggal dalam upaya mengembangkan diri untuk menjamin kelangsungan hidup. Prinsip pemberdayaan masyarakat yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan pemberdayaan yaitu:

- 1) Tidak ada paksaan dan pelaksanaannya demokratis. Setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh ada unsur pemaksaan karena setiap orang berbeda baik dari bakat, minat maupun potensi. Oleh karena itu pelaksanaan pemberdayaan sama untuk setiap orang.
- 2) Kebutuhan dan potensi merupakan pondasi dari kegiatan pemberdayaan karena setiap individu pada prinsipnya mempunyai keinginan dan keunggulan diri sehingga pemberdayaan akan diawali dengan menumbuhkan potensi dan keinginan sehingga pada akhirnya akan terbentuk masyarakat dan warga yang mandiri.
- 3) Masyarakat menjadi pelaku dan subjek utama pemberdayaan sehingga dalam menentukan sasaran, pendekatan, serta kegiatan pemberdayaan seharusnya didasarkan pada kehendak bersama masyarakat itu sendiri.
- 4) Perlu di tumbuhkan kembali kearifan lokal pada masyarakat. Nilai dan budaya sebagai nilai luhur dan hal ini merupakan jati diri masyarakat sehingga dijadikan modal sosial dalam pembangunan.
- 5) Masyarakat jangan berhenti belajar sehingga potensi yang ada di dalam dirinya dapat bertumbuh. Belajar sepanjang hayat (*life long learning education*), belajar di manapun, kapan pun dan dengan menggunakan berbagai sumber yang tersedia di lingkungan sekitar (bahan, alat, teknik).
- 6) Keragaman budaya sangat perlu diperhatikan di dalam pemberdayaan karena hal ini akan meningkatkan toleransi dan menyadarkan kita bahwa kita berada di lingkungan yang beragam baik suku, agama, bahasa maupun budaya.
- 7) Masyarakat perlu berpartisipasi aktif. Kegiatan partisipatif diawali dengan kegiatan untuk merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memanfaatkan output pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Partisipasi

masyarakat dapat di perkuat dengan (1) memperkuat kebersamaan, empati dan gotong royong; (2) memperkuat jaringan dan (3) kemampuan membangun partisipasi di pusat maupun daerah.

- 8) Sasaran dari pemberdayaan yang di lakukan pada masyarakat dengan menumbuhkembangkan jiwa wirausaha serta kemandirian.

2.4.3 Fase Pemberdayaan Masyarakat

Sumodiningrat (dalam Affriansyah, dkk;2023) mejelaskan fase pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus-menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Adapun tahapan pemberdayaan yang harus dilalui adalah meliputi:

- 1) Tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahapan transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan sampai keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.
- 3) Tahapan peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan sampai keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Soekanto (dalam Affriansyah, dkk;2023) juga menjelaskan dalam menjalankan tahapan pemberdayaan masyarakat, ada tujuh langkah yang bisa dilakukan, yaitu:

- 1) Persiapan, yang bisa dilakukan dalam tahap persiapan, yakni penyimpanan petugas yang berarti tenaga pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh community worker dan persiapan wadah yang berusaha dilakukan dengan arahan tak langsung.

- 2) Pengkajian (assessment), dimana proses pengkajian dapat dilakukan secara individu atau melalui kelompok-kelompok di masyarakat. Pada tahap ini, petugas harus bisa mengidentifikasi persoalan kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan sumber daya.
- 3) Perencanaan alternatif program, disini petugas yang memegang peran sebagai agen perubahan (agent of change) berpartisipasi melibatkan masyarakat untuk berpikir tentang persoalan yang dihadapi serta solusi atas persoalan tersebut. Masyarakat dalam konteks ini diharapkan mempunyai beberapa alternatif program yang bisa dijalankan.
- 4) Performalisasi rencana aksi, disini agen perubahan membantu kelompok-kelompok dalam merumuskan serta menetapkan program yang bisa dijalankan sebagai solusi persoalan yang ada. Selain itu, agen pun membantu dalam proses formalisasi ide ke dalam tulisan terlebih jika ada pembuatan proposal untuk donatur dana.
- 5) Implementasi program, masyarakat sebagai kader diharapkan bisa menjaga kelangsungan program yang sudah dikembangkan. Sinergi petugas dan masyarakat adalah hal penting di tahap ini sebab kondisi di lapangan bisa jadi berbeda dengan rencana awal.
- 6) Evaluasi, dimana akan berjalan baik jika melibatkan masyarakat sebab akan bisa terbentuk sistem komunitas masyarakat yang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada.
- 7) Terminasi, pada tahap ini terjadi pemutusan hubungan formal dengan komunitas target dan proyek sudah harus segera dihentikan.

2.4.4 Peran Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat berperan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Mardikanto, dkk (dalam Affriansyah, dkk;2023), menjelaskan peran dari pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut:

- 1) Perbaikan kelembagaan (*Better Institution*). Dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan

yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan.

- 2) Perbaikan Usaha (*Better Business*). Perbaikan kelembagaan diharap akan memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan masyarakat yang ada di sekitarnya.
- 3) Perbaikan Pendapatan (*Better Income*). Perbaikan bisnis diharap dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota lembaga, termasuk masyarakat. Sehingga dibutuhkan perbaikan dalam hal penerimaan keuangan masyarakat.
- 4) Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*). Perbaikan pendapatan diharap dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- 5) Perbaikan Kehidupan (*Better Living*). Pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Kemampuan ekonomi akan membuat kehidupan masyarakat lebih baik
- 6) Perbaikan Masyarakat (*Better Community*). Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik pula, sehingga dibutuhkan perbaikan masyarakat.

2.5 Konsep Penyuluhan Sosial

Penyuluhan dalam arti umum dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi atau edukasi yang bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada individu atau kelompok masyarakat, agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Proses penyuluhan ini biasanya dilakukan dengan cara yang mudah dipahami dan dapat diterima oleh audiens, dengan tujuan untuk mengubah atau meningkatkan sikap, perilaku, atau pengetahuan mereka terhadap suatu topik tertentu. Secara umum, penyuluhan lebih luas dan mencakup banyak bidang kehidupan, sedangkan penyuluhan sosial adalah bagian dari penyuluhan yang lebih spesifik dengan tujuan untuk mempengaruhi dan memperbaiki kondisi sosial dalam masyarakat.

2.5.1. Definisi Penyuluhan Sosial

Penyuluhan Sosial sebagai proses penguatan kapasitas adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun hubungan atau jejaring antar individu, kelompok organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di aras global. Kemampuan atau kapasitas masyarakat, diartikan sebagai daya atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara lebih berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien) secara berkelanjutan. Dalam hubungan ini, kekuatan atau daya yang dimiliki setiap individu dan masyarakat bukan dalam arti pasif tetapi bersifat aktif yaitu terus menerus dikembangkan dan/atau dikuatkan untuk “memproduksi” atau menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat.

Penyuluhan sosial dapat disimpulkan sebagai usaha gerak dasar dan/atau langkah awal prakondisi masyarakat terhadap pembangunan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan meningkatkan kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial Masyarakat (Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI, 2019).

2.5.2. Fungsi Penyuluhan Sosial

Fungsi penyuluhan sosial dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Fungsi Preventif: penyuluhan sosial sebagai salah satu upaya pencegahan untuk meminimalisir, bahkan mencegah timbulnya permasalahan sosial yang baru.
- 2) Fungsi Rehabilitatif/Kuratif: penyuluhan sosial sebagai upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.
- 3) Fungsi Pengembangan: penyuluhan sosial ditujukan sebagai usaha pengembangan masyarakat.
- 4) Fungsi Penunjang (Suportif): penyuluhan sosial tidak hanya ditujukan pada bidang kesejahteraan sosial saja tetapi juga dapat menunjang program lain secara lintas sektor.

2.5.3. Metode Penyuluhan Sosial

Metode penyuluhan sosial dapat dibedakan berdasarkan teknik penyampaian dan berdasarkan sasarannya. Berikut penjelasan mengenai metode Penyuluhan sosial:

- 1) Metode penyuluhan berdasarkan teknik penyampaian
 - (1) Penyuluhan Langsung: Penyuluhan secara langsung bertatap muka dengan sasarannya, misalnya dengan pertemuan, demonstrasi, sarasehan, kunjungan, dll.
 - (2) Penyuluhan Tidak Langsung: Penyuluhan tidak langsung berarti pesan yang disampaikan tidak secara langsung dilakukan oleh Penyuluh Sosial tetapi melalui perantara atau media. Seperti misalnya poster, spanduk, pemutaran film, siaran melalui radio atau televisi, dan media internet.
- 2) Metode penyuluhan berdasarkan sasarannya
 - (1) Individu, Penyuluh Sosial berinteraksi langsung dengan sasaran secara perorangan. Metode ini bisa dengan cepat memecahkan masalah dengan bimbingan khusus dari Penyuluh Sosial. Namun jika dilihat dari jumlah sasaran yang ingin dicapai, metode ini kurang begitu efisien karena terbatasnya jangkauan Penyuluh Sosial untuk membimbing secara individu.
 - (2) Kelompok, Penyuluh Sosial mengarahkan dan membimbing sasaran secara berkelompok. Pendekatan ini akan lebih menstimulasi sasaran agar mau bertukar pikiran, pendapat, dan berpartisipasi secara aktif dalam penyuluhan. Metode ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan pertemuan kelompok PKK, atau pertemuan kelompok PKH, kegiatan rapat RW, dll.
 - (3) Massal, metode ini mampu menjangkau sasaran dalam jumlah cukup banyak dan secara singkat. Dilihat dari sisi penyampaian informasi, metode ini cukup baik. Namun penerimaan peserta terhadap isi pesan yang disampaikan baru sebatas pemenuhan semata, belum pada tahap kesadaran ingin berubah. Sehingga dalam penyampaian informasi perlu dilakukan berulang-ulang.

- 3) Media penyuluhan sosial yaitu Akar kata media berasal dari bahasa Latin “medius” yang secara harfiah berarti “tengah, perantara atau pengantar”. Sementara dalam bahasa Arab, media berarti “perantara” atau pengantar pesan dari pengirim pada penerima pesan. Penyuluhan sosial yang bisa dilakukan dengan menggunakan media antara lain:
- (1) Media cetak: contohnya buku teks, modul, pamflet, brosur, leaflet, spanduk, peta, dll.
 - (2) Media elektronik: seperti radio, televisi, megatron, internet, sosial media, dll.
 - (3) Alat bantu/alat peraga seperti alat peraga tertentu, seni peran, wayang, ludruk, dll

2.5.4. Prinsip Penyuluhan Sosial

Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial (2019) menjelaskan dalam melaksanakan tugasnya, seorang Penyuluh Sosial dapat berpegang pada beberapa prinsip dasar seperti:

1) Prinsip Partisipasi

Hubungan antara Penyuluh Sosial dan khalayak perlu dibangun berdasarkan prinsip partisipasi yang di dalamnya mengandung unsur demokratis. Yaitu ruang komunikasi antara Penyuluh Sosial dan khalayak sasaran secara terbuka, transparan, bersahabat dan hangat didasari oleh semangat kesetaraan. Ini penting untuk menciptakan suasana yang obyektif, akrab, kerjasama, konstruktif dan rasa bangga terhadap hasil dari proses yang berjalan dalam komunikasi.

2) Prinsip untuk Semua

Penyuluhan sosial berlaku untuk semua sesuai dengan tujuan dan sasaran penyuluhan sosial dengan penentuan khalayak sasaran berdasarkan pada pertimbangan masalah dan kebutuhan.

3) Prinsip Perbedaan Individual

Tiap individu memiliki keunikan dan kekhususan tertentu yang berbeda antara individu yang satu dengan lainnya. Proses penyuluhan sosial perlu

mempertimbangkan latar belakang, kultur, pendidikan, profesi, kebutuhan dan masalahnya.

4) Prinsip Pribadi

Penyuluhan sosial diterapkan dengan memandang sasaran sebagai pribadi seutuhnya, mereka adalah manusia yang memiliki harga diri, perasaan, keinginan, emosi, dsb.

5) Prinsip Interdisiplin

Permasalahan yang ada pada khalayak sasaran perlu dipandang dari berbagai sudut pandang atau interdisiplin. Bahwa apa yang diberikan oleh Penyuluh Sosial tidak bersifat mutlak, tetapi perlu memberikan peluang terbukanya sudut pandang lain dalam mendekati suatu permasalahan.

6) Prinsip Berpusat pada Sasaran

Ukuran keberhasilan itu bukan terpusat pada Penyuluh Sosial, tetapi pada khalayak sasaran yaitu kepuasan sasaran

2.6 Penyandang Disabilitas

UU No. 8 Tahun 2016 menjelaskan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan persamaan hak.

2.6.1 Ragam Disabilitas

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mengategorikan disabilitas dalam beberapa ragam, yaitu:

1) Disabilitas Fisik

Keterbatasan pada fungsi tubuh yang memengaruhi kemampuan fisik seseorang, seperti kelumpuhan, amputasi, atau gangguan motorik.

2) Disabilitas Mental

Keterbatasan pada fungsi mental yang memengaruhi kemampuan berpikir atau merencanakan, seperti gangguan intelektual atau gangguan jiwa.

3) Disabilitas Intelektual

Keterbatasan dalam pengembangan kemampuan intelektual yang dapat memengaruhi perilaku dan keterampilan individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

4) Disabilitas Sensorik

Keterbatasan pada indera seseorang, seperti gangguan pada penglihatan atau pendengaran, seperti tuna netra (kebutaan) dan tuna rungu (ketulian).

5) Disabilitas Komunikasi

Keterbatasan dalam kemampuan untuk berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal.

2.6.2 Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 menjamin berbagai hak bagi penyandang disabilitas untuk memastikan kesetaraan dan inklusi sosial. Beberapa hak utama penyandang disabilitas antara lain:

1) Hak atas Pendidikan (Pasal 8)

Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan harus disediakan oleh pemerintah serta masyarakat. Pendidikan inklusif diharapkan dapat diakses oleh semua kalangan.

2) Hak atas Kesehatan (Pasal 10)

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan medis mereka, termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan psikososial.

3) Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak (Pasal 17)

Penyandang disabilitas berhak untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, serta berhak atas perlakuan yang sama di tempat kerja.

4) Hak atas Aksesibilitas (Pasal 9)

Penyandang disabilitas berhak atas aksesibilitas di berbagai fasilitas publik, seperti transportasi, infrastruktur, gedung, dan teknologi, untuk memudahkan mereka berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

5) Hak atas Partisipasi Sosial dan Politik (Pasal 22)

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti hak memilih dalam pemilu, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial, budaya, dan pemerintahan.

6) Hak atas Perlindungan Hukum (Pasal 21)

Penyandang disabilitas dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan yang merugikan mereka. Negara wajib menyediakan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

7) Hak atas Bantuan Sosial dan Fasilitas Khusus (Pasal 12)

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, seperti tunjangan sosial dan alat bantu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

2.7 Aksesibilitas

2.7.1 Definisi Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemampuan seseorang untuk menjangkau, menggunakan, atau memperoleh manfaat dari fasilitas, layanan, informasi, dan lingkungan tanpa hambatan. Konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti transportasi, infrastruktur fisik, teknologi, komunikasi, dan layanan publik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tentang Penyandang Disabilitas, aksesibilitas didefinisikan sebagai kondisi yang memungkinkan setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk mengakses lingkungan fisik, transportasi, informasi, komunikasi, serta fasilitas dan layanan publik lainnya secara mandiri dan aman.

2.7.2 Dimensi Aksesibilitas

Aksesibilitas mencakup berbagai dimensi, antara lain:

1) **Aksesibilitas Fisik**

Mengacu pada ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti ramp, lift, toilet yang dapat diakses kursi roda, serta jalur taktil untuk tunanetra.

2) **Aksesibilitas Informasi dan Komunikasi**

Mengacu pada ketersediaan informasi dalam bentuk yang dapat diakses oleh semua orang, seperti teks braille, alat bantu dengar, terjemahan bahasa isyarat, atau aplikasi pembaca layar untuk tunanetra.

3) **Aksesibilitas Layanan Publik**

Berarti setiap layanan publik harus dapat diakses oleh semua orang, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik.

4) **Aksesibilitas Sosial dan Kultural**

Melibatkan perubahan sikap dan budaya masyarakat agar lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas.

2.7.3 Prinsip Aksesibilitas

Aksesibilitas terdapat beberapa prinsip yaitu:

1) **Kesetaraan:** Semua individu memiliki hak yang sama untuk mengakses fasilitas, layanan, dan informasi.

2) **Kemandirian:** Aksesibilitas harus mendukung penyandang disabilitas untuk menjalani hidup secara mandiri.

3) **Keamanan:** Semua fasilitas dan layanan harus dirancang agar aman digunakan oleh siapa pun.

- 4) Keterjangkauan: Aksesibilitas tidak hanya harus tersedia tetapi juga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

2.7.4 Tantangan dalam Implementasi Aksesibilitas

Tantangan yang pada umumnya ditemui dalam implementasi aksesibilitas yaitu:

- 1) Kurangnya Infrastruktur yang Memadai
Banyak fasilitas umum di Indonesia yang belum ramah disabilitas, seperti trotoar yang tidak rata atau tidak memiliki ramp.
- 2) Minimnya Kesadaran Masyarakat
Seringkali, hambatan bukan hanya fisik tetapi juga sosial, seperti stigma terhadap penyandang disabilitas.
- 3) Keterbatasan Anggaran
Pembangunan fasilitas yang ramah aksesibilitas sering dianggap memerlukan biaya besar, sehingga kurang menjadi prioritas.
- 4) Kesenjangan Regional
Wilayah perkotaan mungkin memiliki akses yang lebih baik dibandingkan pedesaan.

2.8 Layanan Sosial

2.8.1 Definisi Layanan Sosial

Layanan sosial adalah segala bentuk bantuan, dukungan, atau intervensi yang diberikan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau komunitas untuk membantu individu atau kelompok yang menghadapi masalah sosial. Layanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketidakadilan sosial, dan mempromosikan inklusi sosial. Berikut beberapa definisi layanan sosial menurut para ahli:

- 1) Payne (2014): Layanan sosial adalah sistem dukungan formal yang dirancang untuk membantu orang-orang menghadapi masalah hidup dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

- 2) Zastrow (2016): Layanan sosial mencakup program dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dasar individu dan komunitas, termasuk kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial.

2.8.2 Tujuan Layanan Sosial

Tujuan Layanan Sosial ada beberapa yaitu:

- 1) Memenuhi Kebutuhan Dasar yaitu memberikan akses kepada masyarakat yang membutuhkan terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan.
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yaitu memberdayakan individu atau kelompok agar mampu mengatasi permasalahan sosial dan hidup secara mandiri.
- 3) Melindungi Kelompok Rentan yaitu memberikan perlindungan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan.
- 4) Menciptakan Inklusi Sosial yaitu membantu individu dan kelompok yang terpinggirkan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

2.8.3 Jenis-Jenis Layanan Sosial

Jenis-jenis Layanan Sosial dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Layanan Sosial Formal yaitu layanan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui program-program seperti: Bantuan sosial (bansos), Jaminan sosial (BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan), Rehabilitasi sosial untuk korban bencana atau penyandang disabilitas.
- 2) Layanan Sosial Nonformal yaitu layanan yang dilaksanakan oleh organisasi non-pemerintah, yayasan, atau komunitas masyarakat yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti: Program pendidikan informal, Pelayanan kesehatan gratis, Bantuan komunitas lokal untuk korban kekerasan.

2.8.4 Prinsip Layanan Sosial

Prinsip dalam layanan sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kesetaraan yaitu semua orang memiliki hak untuk mengakses layanan sosial tanpa diskriminasi.
- 2) Partisipasi yaitu melibatkan individu atau kelompok sasaran dalam proses pemberian layanan.
- 3) Keberlanjutan yaitu program harus dirancang agar memberikan dampak jangka panjang.
- 4) Berbasis Hak yaitu layanan sosial harus mengacu pada pemenuhan hak asasi manusia.

2.9 Regulasi yang mendukung penanganan kasus

Berikut adalah regulasi yang mendukung aksesibilitas layanan sosial bagi penyandang disabilitas:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menggantikan UU Nomor 4 Tahun 1997 dan menjadi landasan hukum utama.
 - (1) Pasal 9: Penyandang disabilitas memiliki hak atas aksesibilitas di berbagai sektor, termasuk fasilitas umum, layanan sosial, transportasi, dan teknologi.
 - (2) Pasal 42-44: Menegaskan pentingnya aksesibilitas dalam layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019
Mengatur perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi hak penyandang disabilitas dan mewajibkan aksesibilitas fisik, informasi, dan komunikasi di lingkungan publik.
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017
Memberikan pedoman teknis pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas, seperti: Jalur landai (ramp), Lift dan eskalator yang dilengkapi panduan suara, Toilet dan parkir khusus disabilitas.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menyertakan aksesibilitas sebagai bagian dari kewajiban pemberi kerja, terutama dalam pengadaan pekerjaan untuk penyandang disabilitas dan menjamin perlakuan yang setara dalam proses kerja dan memberikan fasilitas kerja yang inklusif.

5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017

Pedoman rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas melalui program seperti: Pemberian alat bantu (kursi roda, alat bantu dengar), Pelatihan keterampilan untuk kemandirian ekonomi, Pendampingan sosial.

6) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Percepatan Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Menegaskan peran semua kementerian untuk mempercepat pembangunan fasilitas ramah disabilitas fokus pada: Digitalisasi layanan public, Pengembangan transportasi umum yang inklusif, Edukasi masyarakat tentang hak disabilitas.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Mengatur pendidikan inklusif, termasuk fasilitas sekolah, alat bantu belajar, dan pelatihan guru untuk menangani kebutuhan khusus peserta didik disabilitas.

8) Peraturan Daerah (Perda)

Beberapa daerah di Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk mendukung penyandang disabilitas, misalnya:

- (1) Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Perda Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Fokus pada aksesibilitas transportasi dan pembangunan fasilitas umum

BAB III

KONTEKS PRAKTIKUM KOMUNITAS

3.1. Gambaran Umum Komunitas Lokasi Praktikum

Desa Babatan adalah sebuah wilayah yang kaya akan potensi alam, budaya, dan tradisi. Terletak di daerah strategis dengan suasana pedesaan yang asri, desa ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Dengan ciri khas masyarakat yang ramah dan adat istiadat yang terjaga, Desa Babatan dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

3.1.1. Sejarah Desa Babatan

Desa Babatan asal mulanya merupakan sebuah Kampung Babakan dari Desa Kadugede. Pada tahun 1936 Kampung Babakan memisahkan diri dari Desa Kadugede menjadi Desa Babatan dibawah kepemimpinan Bapak Kuwu Israf selama 1 (satu) tahun dan bergabung lagi dengan Desa Kadugede sampai dengan tahun 1946. Pada tanggal 29 Januari 1946 memisahkan diri lagi dari Desa Kadugede yang di pimpin oleh Bapak Kuwu Asmawijaya.

Desa Babatan sekarang mempunyai 2 (dua) dusun dan 8 (delapan) RT dengan luas wilayah 35,397 Ha. Desa Babatan memiliki sebuah situs sejarah yaitu Pemakaman Syeh Maulana Mansyur atau lebih dikenal adalah Pangeran Lautan, nama Pangeran Lautan dijadikan nama wilayah yang berlokasi di RT. 08 RW. 02 Dusun Kaliwon Desa Babatan Wilayah Cilaut.

Berdirinya Desa Babatan pada waktu itu memiliki jumlah penduduk 450 jiwa. Masa pemerintahan Desa Babatan dari tahun 1936 sampai dengan tahun 2024 telah terjadi 14 kali pergantian kepemimpinan terdiri dari 10 Kepala Desa / Kuwu dan 7 kali oleh Pejabat Kepala Desa atau Pejabat Sementara. Letak lokasi Kantor Pemerintahan sejak tahun 1936 sampai dengan tahun 2003 berada di tengah lingkungan pemukiman tepatnya di wilayah RT. 03/01 Dusun Pahing Desa Babatan dan sejak tahun 2003 s.d sekarang Kantor Pemerintahan dipindahkan ke Jalan Tentara Pelajar Desa Babatan.

3.1.2. Kondisi Geografis

Secara letak geografis, Babatan adalah salah satu bagian wilayah dari Kecamatan Kadugede dengan karakteristik batas wilayah: sebelah utara merupakan dataran rendah yang berfungsi sebagai lahan persawahan dan tanaman pangan; sebelah timur, adalah daerah dataran rendah berbentuk persawahan dengan sebagian perbukitan; sebelah selatan, juga merupakan dataran rendah dengan digunakan untuk persawahan; dan sebelah barat, adalah wilayah dataran tinggi dengan dominasi wilayah perbukitan.

Secara administratif Desa Babatan berbatasan dengan Desa Kadugede di bagian utara; Desa Cipondok di bagian timur; Desa windujanten di bagian selatan dan Desa Bayuning di sebelah barat. Luas wilayah ini 35,397 Ha yang digunakan untuk berbagai macam kegiatan masyarakat. Wilayah darat misalnya, terbagi atas beragam penggunaan seperti: Pekarangan, Tegalan/ Kebun, Lapangan Olahraga, Alun-alun, Sarana Keagamaan, Kuburan, Puskesmas, Jalan, Solokan, Perkantoran/ Sekolah dan Kolam, termasuk digunakan sebagai area persawahan. Wilayah ini hampir sama dengan daerah lain di wilayah Kabupaten Kuningan, yang secara umum memiliki iklim tropis dan angin muson. Jarak tempuh ke pusat kota Kabupaten sekitar 3,6 km dengan waktu tempuh kira-kira 25 menit dari Kantor Kecamatan Kadugede.

Tabel 3.1. Kondisi Geografis Desa Babatan

a. Letak Geografis			
1.	Luas Wilayah	35,397	Ha
2.	Ketinggian dari permukaan laut	500	Mm
3.	Curah hujan rata-rata	1.240	Mm
4.	Suhu minimum/ maksimum	28 - 32	°C
b. Batas wilayah			
1.	Sebelah Utara	Desa Cipondok	
2.	Sebalah Timur	Desa Kadugede	
3.	Sebalah Selatan	Desa Kadugede	
4.	Sebalah Barat	Desa Byauning	

c. Keadaan Wilayah				Keterangan
1.	Sawah	15,820	Ha	Produktif
2.	Darat	19,577	Ha	Perumahan
d. Kondisi Jalan				
1.	Jalan Provinsi/ Hotmix	0,340	Km	Baik
2.	Jalan Kabupaten	0,8	Km	Perlu perbaikan
3.	Jalan Desa	0,8	Km	Baik
4.	Panjang Jalan Gang/ plur aspal	2,2	Km	Baik
e. Jarak Tempuh				
1.	Jarak ke kota Kecamatan	0,5	Km	5 menit
2.	Jarak ke kota Kabupaten	5	Km	15 menit
3.	Jarak ke Ibu kota Provinsi	135	Km	5 jam
4.	Jarak ke Ibu kota Negara	254	Km	6 jam

3.1.3. Kondisi Demografis

Desa Babatan dengan segala kemajemukannya terdiri dari berbagai macam etnis dan suku bangsa serta keanekaragaman agama dan kepercayaan hidup dengan rukun. Menurut data kependudukan Desa Babatan tercatat sebanyak 1.614 jiwa, serta 529 Kepala Keluarga/KK.

3.1.4. Kondisi Ekonomi dan Pembangunan

Kondisi ekonomi di Desa Babatan dapat dilihat dari beberapa usaha ekonomi produktif, mata pencaharian, dan pengusaha.

Tabel 3.2. Kondisi Ekonomi di Desa Babatan

a.	Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah	Satuan
	Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-MD)	2	Klpk
	Peternakan	-	Buah
	Perikanan	1	Buah
	Home Industri	-	Buah

	Perdagangan	1	buah
	Pengrajin	-	jiwa
b.	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan
	PNS, BUM dan BUMD	131	jiwa
	TNI-POLRI	12	jiwa
	Pensiunan dan Purnawirawan	57	jiwa
	Buruh Tani	25	jiwa
	Buruh Bangunan	20	jiwa
	Dagang	33	jiwa
	Swasta, Wiraswasta Tenaga Kontrak	251	jiwa
	Pengrajin/ Home Industri	12	jiwa
	Peternakan	1	jiwa
	Perikanan	0	jiwa
	Jasa	18	jiwa
c.	Pengusaha	Jumlah	Satuan
	Swalayan	2	buah
	Toko	15	buah
	Konter dan Warung	52	buah
	Penggilingan Padi	2	buah
	Penggilingan Tapioka	1	Buah
	Bengkel Las	2	buah

3.1.5. Perangkat Desa Babatan

Jumlah perangkat desa yang ada di Desa Babatan berjumlah 10 (sepuluh) anggota dengan 1 (satu) Kasatgas dan 4 Linmas. Kepemimpinan yang ada di Desa Babatan sampai sekarang sudah mengalami 14 kali pergantian kepala desa dan 7 kali pergantian oleh pejabat kepala desa atau pejabat sementara, yaitu:

- 1) Singa Permana dan Israf (1936) (Singa Permana menyerahkan kepemimpinan kepada Israf)
- 2) Asma Wijaya (1946 – 1957)

- 3) Sadja Atmaja (1957 – 1964)
- 4) Salkan (1964 – 1976)
- 5) Sayuti (1976)
- 6) Sukanta Atmaja (1977 – 1982)
- 7) Sayuti (1982)
- 8) K. Suyatna (1983 – 1994)
- 9) Yayat Nuryat (1994 – 1995)
- 10) UU Sudrajat (1995 – 2002)
- 11) Wahyu (2002)
- 12) Romi Andrian (2003 – 2011)
- 13) Uyud (2011)
- 14) Sunarman (2012 – 2018)
- 15) Yadi Juharyadi (2018)
- 16) Sa'adah (2018 – 2019)
- 17) Romi Andrian (2020 – Sekarang)



Gambar 3.1. Struktur Pemerintahan Desa Babatan

3.2. Program/Layanan Yang diberikan Komunitas

Pemerintah Desa Babatan menyediakan berbagai layanan administratif dan sosial untuk mendukung kehidupan warganya. Layanan-layanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses hak-haknya, baik dalam hal administrasi kependudukan, pernikahan, kelahiran, kematian, serta bantuan sosial. Berikut merupakan layanan-layanan dan program yang disediakan oleh Desa Babatan:

1) Surat Kematian

Surat kematian adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mencatat dan mengonfirmasi bahwa seorang warga telah meninggal dunia. Surat ini penting untuk keperluan administrasi, termasuk pengurusan hak waris, asuransi, dan pembaruan data kependudukan.

Proses pengurusan yaitu Untuk mendapatkan surat kematian, keluarga yang berduka perlu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak desa dengan membawa dokumen pendukung, seperti KTP almarhum/almarahumah dan Kartu Keluarga (KK). Proses ini akan melibatkan pihak RT/RW sebagai saksi atau pengantar dalam proses administrasi.

2) Surat Kelahiran

Surat kelahiran adalah dokumen yang diterbitkan untuk mencatat kelahiran seorang anak sebagai warga negara. Surat ini menjadi dasar bagi pembuatan akta kelahiran yang sah. Pencatatan kelahiran sangat penting untuk memverifikasi identitas dan status hukum anak di mata negara.

Proses pengurusan yaitu orang tua yang baru memiliki anak harus segera melapor kepada pihak desa dengan membawa surat keterangan lahir dari rumah sakit atau bidan, serta KK dan KTP kedua orang tua. Setelah itu, pihak desa akan memverifikasi dokumen tersebut dan menerbitkan surat kelahiran yang dapat digunakan untuk pembuatan akta kelahiran.

3) Pengurusan Pindah dan Datang

Layanan ini diberikan kepada warga yang pindah dari atau ke Desa Babatan. Proses ini penting untuk menjaga keakuratan data kependudukan dan memastikan bahwa setiap warga terdaftar dengan benar sesuai dengan domisilinya.

Proses pengurusannya yaitu bagi warga yang pindah keluar, mereka harus mengurus surat pengantar pindah yang dikeluarkan oleh pihak desa, yang kemudian akan digunakan untuk melaporkan kepindahan kepada desa tujuan. Sementara itu, bagi warga yang baru datang ke desa, mereka harus menyerahkan surat pindah dari desa asal dan melapor ke kantor desa untuk pembaruan data kependudukan.

4) Formulir Kartu Keluarga (KK) dan KTP

Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah dokumen identitas penting yang digunakan oleh setiap warga negara untuk mengakses layanan publik dan administratif. Pengurusan KK dan KTP adalah bagian dari layanan yang diberikan oleh desa untuk memastikan data kependudukan tercatat dengan akurat.

Proses pengurusan yaitu warga yang belum memiliki KTP atau KK dapat mengajukan permohonan ke kantor desa dengan membawa dokumen persyaratan seperti KK lama (jika ada), surat pengantar dari RT/RW, dan dokumen identitas lainnya (seperti akta kelahiran atau surat nikah). Proses ini melibatkan verifikasi data dan penerbitan KTP serta KK baru atau pembaruan data jika ada perubahan.

5) Adon Nikah

Layanan adon nikah bertujuan untuk membantu pasangan yang akan menikah dalam mengurus surat-surat yang diperlukan, seperti surat keterangan belum menikah dan izin menikah dari orang tua atau wali. Layanan ini memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan sah secara hukum dan tercatat dalam administrasi negara.

Proses pengurusannya yaitu calon pengantin harus mengajukan permohonan ke desa dengan membawa dokumen seperti KTP, KK, surat keterangan belum menikah dari desa atau Desa tempat tinggal, serta surat pengantar dari RT/RW.

Setelah persyaratan lengkap, surat nikah dapat dikeluarkan sebagai bagian dari proses administrasi pernikahan.

6) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

BLT-DD adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas di Desa Babatan yang terdampak situasi darurat, seperti pandemi atau bencana alam. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang membutuhkan dukungan langsung dari pemerintah.

Proses pengurusannya yaitu pemerintah desa melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat, berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial mereka. Setelah data dikumpulkan dan diverifikasi, bantuan disalurkan langsung kepada penerima manfaat. Proses ini melibatkan pembagian bantuan secara transparan dan akuntabel, serta pengawasan untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada pihak yang berhak.

3.3. Profil Penerima Program Layanan Komunitas

Penerima manfaat dari berbagai program dan layanan yang disediakan di Desa Babatan terdiri dari dua kelompok utama, yaitu penyandang disabilitas dan masyarakat desa Babatan secara umum. Penyandang disabilitas di Desa Babatan terdiri dari berbagai individu dengan berbagai jenis disabilitas, termasuk fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Kelompok ini meliputi anak-anak dan dewasa yang memiliki keterbatasan dalam hal pergerakan, komunikasi, atau interaksi sosial. Penyandang disabilitas di desa ini mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas umum, pendidikan, pekerjaan, serta mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Beberapa penyandang disabilitas mungkin tinggal di rumah dengan dukungan keluarga, sementara yang lainnya mungkin terlibat dalam kegiatan komunitas atau bekerja di sektor informal dengan adanya penyesuaian yang mendukung.

BAB IV

PELAKSANAAN INTERVENSI KOMUNITAS

4.1. Tahap Membangun Relasi (*Dialog*)

4.1.1. Kegiatan Silaturahmi Bersama Kepala Seksi Pelayanan dan Sekertaris Desa

Dialog merupakan langkah awal dalam praktikum komunitas yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat. Dialog ini menjadi momen penting untuk mempersiapkan kerja sama, menciptakan kepercayaan, memahami tantangan yang ada, dan menentukan arah kegiatan yang akan dilaksanakan selama praktikum. Proses ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan maksud dan tujuan kegiatan praktikum kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara mahasiswa dengan lingkungan tempat berpraktik.

Pada hari Selasa, 29 Oktober 2024 mahasiswa praktikan bertemu dengan kasipel (Kepala Seksi Pelayanan) sekaligus pendamping lapangan praktikum yang berada di Desa Babatan yaitu Bapak Dudi Imanudin. Praktikan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan praktikan melaksanakan praktikum komunitas, Bapak Kasi Pelayanan juga menjelaskan mengenai Desa Babatan.

Bapak Kasi Kesra menjelaskan bahwa penduduk yang ada di Desa atau Desa Babatan ini sebanyak 1614 jiwa penduduk, Bapak Kasi Pelayanan juga menyebutkan bahwa Desa Babatan ini penerima bansos paling banyak dari desa-desa lainnya. Bapak Kasi Pelayanan menjelaskan tugas Desa ini untuk membantu data masyarakat yang ingin untuk mendapatkan bantuan yang jika itu memenuhi syaratnya. Desa Babatan ini terdapat bermacam-macam keyakinan yang dianut oleh penduduk seperti Islam, Kristen protestan, Kristen Katholik, Hindu, dan Budha.

4.1.2. Kegiatan Silaturahmi Dengan RT, RW dan Karang Taruna

Pada hari Senin, 04 November 2024 setelah beristirahat praktikan bersama kelompok melakukan memulai kegiatan persiapan sosial dengan mendatangi rumah aparat setempat, yaitu Pak RT dan Pak RW Dan Karang Taruna pada sore harinya.

Praktikan berjalan kaki ke rumah Pak RT dan Pak RW sambil mengenal lebih dekat lingkungan sekitar tempat tinggal praktikan. Sepanjang perjalanan, praktikan bertanya kepada kepada warga setempat mengenai tempat tinggal Pak RT dan Pak RW. Seorang warga setempat dengan senang hati memberikan petunjuk tempat tinggal dan bahkan mengantar praktikan langsung ke rumah Pak RT.

Setelah melakukan perjalanan, praktikan sampai dirumah Pak RT praktikan disambut dengan baik dan dipersilahkan duduk sebelum praktikan dan Pak RT memulai perbincangan, Praktikan dan Pak RT memulai perkenalan dengan Pak RT yang bernama Pak Aguslan. Kami memulai perbincangan menjelaskan tujuan kedatangan praktikan, yakni untuk memberitahukan bahwa mahasiswa praktikan sedang melaksanakan praktikum Komunitas atau KKN di Desa Babatan,

4.2. Tahap Asesmen (Discovery)

4.2.1. Melakukan kegiatan *Community Meeting* dengan menggunakan tools MPA (*Method Partisipatory Assesment*) dan SLA (*Social Livehood Assesment*).

Pada Hari Jumat, 08 November 2024 mahasiswa praktikan Melakukan kegiatan *Community Meeting* dengan menggunakan tools MPA (*Method Partisipatory Assesment*) dan SLA (*Social Livehood Assesment*). dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Babatan. Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat dari 2 lingkungan yang ada di Desa Babatan, yaitu Lingkungan Pahing dan wage.

Dalam pertemuan ini, sebanyak 4 tokoh masyarakat diundang untuk berpartisipasi. Meskipun demikian, kehadiran para tokoh ini cukup representatif untuk menggambarkan kondisi yang ada di masing-masing lingkungan. Dengan demikian, kegiatan asesmen dan diskusi dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan.

Tujuan utama dari kegiatan *Community Meeting* ini adalah melakukan identifikasi masalah di setiap lingkungan di Desa Babatan. Mahasiswa praktikan menggunakan metode *Participatory Assessment* (MPA) untuk mendapatkan informasi langsung dari tokoh masyarakat mengenai isu-isu yang ada. Proses ini melibatkan partisipasi aktif warga dalam menyampaikan permasalahan yang mereka rasakan dan permasalahan yang dianggap paling mendesak di wilayah mereka.

Dari hasil asesmen MPA, teridentifikasi ada masalah utama yang dihadapi masyarakat di Desa Babatan. Masalahnya adalah Penyandang Disabilitas.

4.3. Tahap Rencana Intervensi (Discovery)

4.3.1. Perencanaan Program

Program perencanaan intervensi yang telah disusun oleh praktikan bersama dengan TKM dan Masyarakat memiliki hasil sebagai berikut:

1) Nama Program

Berdasarkan dengan hasil diskusi dan kesepakatan bersama yang telah dilakukan, maka nama program yang akan dibuat yaitu “Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Melalui Kelompok Peduli Penyandang Disabilitas di Desa Babatan”.

2) Tujuan Program

Orang berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No. 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. RBM memiliki tugas pokok, sebagai berikut :

- (1) Membantu Penyandang Disabilitas Desa Babatan dalam menyelenggarakan pembinaan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Membantu Penyandang Disabilitas Desa Babatan dalam peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Melakukan koordinasi dengan unsur terkait.
- (4) Melaporkan laporan secara berkala.

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat merupakan upaya untuk memulihkan keberfungsian orang yang mengalami gangguan atau hambatan, baik secara fisik, mental, psikologis, maupun sosial, dengan bertumpu pada peran keluarga dan kelompok masyarakat, serta mendayagunakan berbagai prakarsa, potensi, dan sumber daya masyarakat.

3) Bentuk Kegiatan Program

Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program “Pembentukan RBM Desa Babatan Peduli Disabilitas Desa Babatan Dan Penyuluhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas”.

(1) Pendampingan Mengikuti Program Hari Disabilitas Internasional



Gambar 4.1. Pendampingan Mengikuti Program Hari Disabilitas Internasional

(2) Membuat Capacity Building di rumah makan Cimuncang



Gambar 4. 2. Membuat Capacity Building di rumah makan Cimuncang

(3) Penyuluhan Sosial Penyandang Disabilitas



Gambar 4.3. Penyuluhan Sosial Penyandang Disabilitas

4) Indikator Keberhasilan

Berdasarkan program yang dirumuskan, indikator keberhasilan dari program ini yaitu:

- (1) Terbentuk nya kelompok masyarakat yang peduli terhadap penyandang disabilitas desa babatan.
- (2) Penyandang disabilitas secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, seperti diskusi dan pelatihan.
- (3) Melalui kelompok, penyandang disabilitas berhasil meningkatkan keterampilan, seperti komunikasi, kepemimpinan, atau keterampilan teknis.
- (4) Kelompok penyandang disabilitas mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

5) Strategi, Taktik dan Teknik

Strategi dan taktik pertama yang digunakan praktikan dalam pelaksanaan Praktikum Komunitas adalah kerjasama (*collaboration*). Praktikan menerapkan kerjasama dengan melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan yang melibatkan kelompok sasaran untuk mencapai perubahan yang telah disepakati. Selain itu,

praktikan juga fokus pada pengembangan kapasitas Tim Kerja Masyarakat (TKM) dan anggota Kelompok Babatan Peduli disabilitas agar mereka dapat mendukung serta menjunjung hak-hak penyandang disabilitas. Teknik yang digunakan adalah partisipatif, di mana TKM dilibatkan dalam proses pengaksesan sistem sumber untuk meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Desa Babatan.

6) Jadwal Kegiatan

Hasil dari perencanaan intervensi yaitu tersusunnya program “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembentukan Kelompok Peduli Penyandang Disabilitas”. Berikut merupakan rincian kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan dan direncanakan bersama anggota TKM antara lain:

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat dan penyandang disabilitas Desa Babatan tentang apa itu disabilitas dan hak hak disabilitas dilaksanakan pada hari Senin, 25 November 2024
- (2) Pembentukan dan penyusunan pengurus Kelompok babatan peduli peduli disabilitas rencananya dilaksanakan pada hari Selasa, 26 November 2024
- (3) Pendampingan mengikuti rangkaian Hari Disabilitas Internasional, 1 Desember 2024
- (4) Capacity Building bersama penyandang disabilitas di rumah makan Cimuncang, 2 Desember 2024
- (5) Sharing Session bersama penyandang disabilitas 3 Desember 2024

7) Rancangan Evaluasi

Rancangan evaluasi dilakukan dengan menyusun indikator keberhasilan program. Indikator disusun setelah menyusun kegiatan program. Tujuan dari indikator keberhasilan adalah acuan untuk TKM menilai suatu program.

8) Rancangan Biaya Sumber

Dalam menyusun rancangan biaya, praktikan bersama Tim Kerja Masyarakat (TKM) berkolaborasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan program. Setelah melalui proses diskusi dan kesepakatan bersama, diputuskan bahwa biaya pelaksanaan program akan ditanggung menggunakan dana dari TKM dan kontribusi pribadi praktikan, mengingat tidak ada donatur dari pihak lain yang berhasil didapatkan. Berikut adalah rincian rencana anggaran biaya pelaksanaan intervensi selama praktikum komunitas:

Pengeluaran paling banyak digunakan untuk biaya konsumsi, sedangkan biaya paling kecil yaitu print absen. Rincian sumber biaya program dari TKM dan dana mandiri sebesar Rp 250.000,-.

4.3.2. Pembentukan TKM (Tenaga Kerja Masyarakat)

Terbentuknya struktur kepengurusan TKM untuk Program Kelompok Masyarakat Peduli Penyandang Disabilitas, dengan susunan sebagai berikut:



Gambar 4.4. Struktur Kepengurusan

4.4. Tahap Intervensi (Development)

Pelaksanaan intervensi merupakan langkah konkret dalam mengimplementasikan rencana intervensi yang telah dirancang sebelumnya. Tahapan ini mencakup berbagai aktivitas langsung di tengah masyarakat untuk mewujudkan program yang telah disepakati. Pelaksanaan dilakukan dengan konsistensi yang tinggi, melibatkan dukungan anggaran yang memadai, serta memprioritaskan profesionalisme dalam setiap aspek implementasi.

4.4.1. Penyuluhan Kepada Penyandang Disabilitas Desa Babatan

1) Proses

Kegiatan penyuluhan sosial tentang hak-hak penyandang disabilitas dilaksanakan pada hari Senin, 25 November 2024, bertempat di Aula rumah Makan Cimuncang, mulai pukul 13.00 hingga 15.00 WIB. Praktikan bersama Tim Kerja Masyarakat (TKM) mengundang seluruh penyandang disabilitas dan masyarakat umum untuk hadir dalam penyuluhan tentang hak-hak penyandang disabilitas.

2) Hasil

Hasil yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan, yaitu:

- (1) Peserta menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya lingkungan inklusif.
- (2) Sebagian besar peserta memahami definisi dan jenis disabilitas setelah penyuluhan
- (3) Masyarakat memahami hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan aksesibilitas fasilitas umum.

4.4.2. Pembentukan Pengurus Kelompok Babatan Peduli Disabilitas (GBPD)

1) Proses

Kegiatan pembentukan dan penyusunan pengurus Kelompok babatan Peduli Disabilitas dilaksanakan pada hari Kamis, 28 November 2024, bertempat embung atau kolam ikan. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 16.00 hingga 17.00 WIB. Praktikan bersama Tim Kerja Masyarakat (TKM)

Proses ini melibatkan peserta secara aktif untuk menentukan pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan berbagai bagian yang akan mendukung keberjalanan forum, seperti divisi edukasi, divisi kampanye sosial, dan divisi kegiatan sosial. Diskusi berlangsung secara interaktif, dengan partisipasi dari semua pihak yang hadir.

2) Hasil

Hasil yang didapat dari kegiatan diatas yaitu:

- (1) Terbentuknya forum anak peduli disabilitas di SD Babatan
- (2) Terbentuknya struktur kepengurusan forum anak peduli disabilitas
- (3) Anak menjadi lebih paham untuk menjunjung tinggi hak – hak penyandang disabilitas

4.4.3. Pembentukan Sekretariat Babatan Peduli Disabilitas

1) Proses

Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat organisasi dan mendukung operasional Kelompok Babatan Peduli Disabilitas, telah dibentuk sebuah sekretariat resmi. Sekretariat ini berfungsi sebagai pusat kegiatan administrasi, koordinasi, dan komunikasi kelompok. Lokasinya dipilih strategis di wilayah Babatan agar mudah diakses oleh penyandang disabilitas, anggota kelompok, serta masyarakat umum. Selain itu, sekretariat ini dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti ruang pertemuan, alat tulis kantor, dan media informasi untuk mendukung berbagai program kelompok. Sekretariat juga menjadi tempat untuk konsultasi bagi keluarga penyandang disabilitas, pusat informasi mengenai program-program pemberdayaan, serta wadah untuk menerima aspirasi dan keluhan terkait isu disabilitas di wilayah Babatan. Pembentukan sekretariat ini diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan program dan meningkatkan efektivitas kegiatan kelompok.

2) Hasil

Hasil yang didapat dari kegiatan diatas yaitu:

- (1) Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai hak-hak disabilitas, pelatihan keterampilan, dan kegiatan kelompok.

- (2) Sekretariat menjadi tempat berkumpul untuk diskusi, perencanaan, dan pelaksanaan program, sehingga meningkatkan keterlibatan anggota kelompok dan masyarakat dalam mendukung penyandang disabilitas.
- (3) Keberadaan sekretariat mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah, LSM, dan mitra lainnya, sehingga mendatangkan lebih banyak dukungan.

4.5. Tahap Evaluasi (Development)

Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan, mencakup tahap asesmen, perencanaan, hingga pelaksanaan intervensi. Penilaian ini dilakukan baik dari segi proses maupun hasil untuk memastikan bahwa tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai secara efektif.

4.5.1. Evaluasi Proses

Evaluasi proses bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana langkah-langkah yang diambil selama pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai rencana. Selama proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial dan pembentukan Forum Anak Peduli Disabilitas, praktikan dan TKM berhasil menjalankan serangkaian tahapan dengan baik. Proses dimulai dengan membangun komunikasi yang efektif antara praktikan, Tim Kerja Masyarakat (TKM), dan pihak terkait lainnya, termasuk masyarakat dan guru di SD Babatan. Penyampaian informasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif, sehingga setiap pihak yang terlibat merasa dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan praktikum komunitas di Desa Babatan tentunya tidak terlepas dari factor pendukung dan factor penghambat dalam proses pelaksanaannya

4.5.2. Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil bertujuan untuk menilai dampak nyata yang dihasilkan dari kegiatan praktikum dan intervensi yang telah dilakukan. Fokusnya adalah pada pencapaian tujuan utama, perubahan yang terjadi di masyarakat, dan manfaat yang dirasakan oleh kelompok.

Hasil dari evaluasi ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta memberikan skor Baik hingga Sangat Baik terhadap program *Kelompok babatan peduli disabilitas*. Berdasarkan data dari tabel penilaian, dapat disimpulkan bahwa program ini berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas program dalam menciptakan kesadaran, meningkatkan partisipasi, dan membangun inklusivitas di lingkungan masyarakat Desa Babatan.

4.6. Tahap Terminasi dan Rujukan

4.6.1. Terminasi

Sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan praktikum, praktikan melaksanakan tahap pengakhiran atau terminasi sebagai penghargaan atas dukungan yang telah diberikan selama kegiatan praktikum.

Kegiatan terminasi dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Desember 2024, dengan mengumpulkan masyarakat dan TKM di Rumah Makan Cimuncang. Dalam kesempatan tersebut, praktikan memaparkan seluruh hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama 40 hari di Desa Babatan, termasuk pencapaian dan pengalaman yang didapatkan selama praktikum. Praktikan juga menyampaikan bahwa praktikum komunitas di Desa Babatan telah resmi berakhir, namun hubungan yang telah terjalin tetap bersifat persaudaraan dan akan tetap terjaga hingga kapanpun.

Selain itu, praktikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak masyarakat, dan TKM yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang sangat berarti selama pelaksanaan praktikum. Sebagai penutup, praktikan memberikan informasi mengenai berakhirnya praktikum dan berpamitan dengan seluruh pihak yang terlibat, berharap agar hubungan yang telah terjalin dapat tetap baik di masa depan.

4.6.2. Rujukan

Sehubungan dengan berakhirnya proses kegiatan praktikum komunitas, praktikan merujuk kepada Pa Maman Selaku Ketua Kelompok Babatan Peduli Disabilitas dan Kepala Desa bapak Romi Adrian untuk memberikan bimbingan dan fasilitasi terhadap program-program yang telah disusun oleh praktikan bersama TKM.

Berharap dapat menindaklanjuti pembentukan Forum Anak Peduli Disabilitas serta pelatihan untuk guru dan masyarakat terkait isu-isu disabilitas.

Praktikan berharap agar pihak-pihak yang terlibat dapat melanjutkan dan menindaklanjuti kegiatan tersebut, mengingat pentingnya keberlanjutan program untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepedulian terhadap penyandang disabilitas di Desa Babatan. Melalui bimbingan dan fasilitasi dari pihak-pihak tersebut, diharapkan program ini dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

BAB V

PRAKTIK BAIK PRAKTIKUM KOMUNITAS

5.1. Integrasi/Keterkaitan/ Saling Melengkapi Metode Community Work dan Group Work serta Capaian terbaik dari Praktikum Komunitas.

Metode *community work* dan *group work* tentunya memiliki integrasi atau keterkaitan satu sama lain dalam proses pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang maksimal. Setelah melakukan praktikum komunitas ini Praktikan menyadari akan keterkaitan antara metode *community work* dan *group work* dalam melakukan intervensi kepada sasaran. Metode *community work* merupakan metode Pekerjaan sosial yang mana sasarannya cukup luas mencakup masyarakat, organisasi, dan komunitas.

Community Work didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang memengaruhi kehidupannya (AMA, 1993). Dilihat dari sasarannya *community work* yang cukup luas meliputi lebih dari sepuluh orang dan membawa perubahan pada komunitas tersebut. Sedangkan metode *group work* penanganan masalah kepada sasaran untuk meningkatkan keberfungsian sosial, yang dilakukan melalui media kelompok. *Group work* dalam pelaksanaannya di praktikum komunitas ini dapat dilihat dari sasarannya, sasaran kepada masyarakat yang kurang dari sepuluh orang dapat dikatakan group namun juga dikatakan komunitas apabila memiliki ciri-ciri kebutuhan atau kepentingan yang sama.

5.2. Refleksi Praktikan (Pengalaman Praktikum untuk pengembangan Diri dan Pengembangan Profesional Calon Pekerja Sosial, Dilema Etik yang Dihadapi dan Solusinya)

5.2.1. Pengalaman Praktikum untuk Pengembangan Diri dan Pengembangan Profesional Calon Pekerjaan Sosial

Awal menjalankan praktikum komunitas, praktikan diharuskan bisa berinteraksi dengan Masyarakat luas secara langsung yang membuat praktikan bertemu, bertegur sapa bahkan bersilaturahmi dengan Masyarakat setiap hari, hal tersebut bukan

menjadi tantangan maupun hambatan, justru menjadikan praktikan terampil dalam komunikasi dan interaksi sosial Masyarakat. Pada tahap awal (*community meeting*) bersama tokoh Masyarakat, tokoh warga, tokoh pemuda, dan tokoh Wanita yang dimana langsung berhadapan dengan Masyarakat, praktikan terampil dalam menunjukkan komunikasi dengan Masyarakat luas, inti dari acara ini adalah praktikan memperkenalkan diri kepada Masyarakat luas dan menjelaskan maksud dan tujuan untuk datang ke Desa Babatan, kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan sore itu, tokoh tokoh dari Desa Babatan sangat berpartisipasi aktif sore itu, ditambah dengan praktikan yang bisa menghidupkan suasana pertemuan, acara (*community meeting*) berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan.

Kegiatan demi kegiatan dilaksanakan mulai dari *transect walk* mengumpulkan data permasalahan maupun potensi yang ada di setiap lingkungan, RT dan RW, praktikan merasa senang karena dapat bersilaturahmi dengan Masyarakat, mengunjungi dan menemui Masyarakat secara langsung memudahkan praktikan mengamati, mengobservasi secara langsung keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat mulai dari asset asset yang dimiliki, potensi yang ada dan yang mungkin di kembangkan, maupun permasalahan yang ada namun diamati belum secara mendalam, karena permasalahan yang mendalam akan di gali lagi pada saat (*community meeting*) ke dua yang menggunakan tools MPA dan SLA. Praktikan merasa senang saat berkunjung langsung ke Masyarakat karena semua Masyarakat menyambut baik dan memberikan informasi yang sangat lengkap, praktikan merasa sangat bersyukur dan merasa sangat berusaha mengembangkan diri dalam kegiatan *transect walk* ini.

Setelah Minggu ke 2 saat menjalankan praktikum, praktikan melakukan asesmen menggunakan tools asesmen MPA dan SLA tokoh-tokoh Masyarakat sangat aktif kooperatif dalam mengikut kegiatan (*community meeting*) ke dua, praktikan menularkan energi semangat dan acara tersebut sangat berjalan dengan lancar dan kala itu praktikan berhasil untuk menggali permasalahan dan potensi yang ada dalam Masyarakat secara lengkap dan disampaikan langsung oleh Masyarakat, dalam penggalian masalah dan potensi yang ada praktikan berhasil mendapatkan

informasi bahwasanya prioritas masalah utama adalah kemiskinan yang Dimana sesuai prediksi, kemudian kenakalan remaja, Kesehatan, limbah dan lansia, setelah itu praktikan segera menentukan focus masalah kemudian merencanakan intervensi dan melaksanakan intervensi praktikan setiap hari bertemu dengan Masyarakat terkhusus TKM yang ada, disitulah praktikan melakukan ketrampilan pekerjaan sosial.

5.2.2. Dilema Etik yang dihadapi dan Solusi nya

- 1) Dilema Etik: Masyarakat yang sangat sering memberikan makanan kepada praktikan membuat ketidak enakannya hati praktikan setiap menjalankan praktikum

Solusi: praktikan tetap menerima karena merupakan salah satu bentuk menghargai perasaan Masyarakat dan tetap menjalin relasi yang sudah terbangun baik dengan Masyarakat.

- 2) Dilema Etik: Saat mengundang narasumber atau ahli dibidang tertentu terkadang tidak mau menerima apresiasi dalam bentuk uang yang diberikan praktikan

Solusi: praktikan tetap tidak memberikan dikarenakan narasumber yang sudah dipaksa paksa tetap tidak mau untuk menerima bentuk apresiasi tersebut.

5.3. Keterlibatan (Peran) Praktikan Dalam Kegiatan Lokasi Praktikum Komunitas

5.3.1. UMKM (Mercy Corps Indonesia)

Kegiatan UMKM Go Digitalisasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 2 November 2024, bertempat di embung dekat Balai Desa Babatan. Acara ini diselenggarakan oleh Mercy Corps Indonesia, yang berkolaborasi dengan praktikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Praktikan diberikan tugas untuk berperan aktif dalam beberapa aspek kegiatan, antara lain menjadi MC (Master of Ceremony), menyusun rundown acara, melakukan dokumentasi, serta membantu jalannya simulasi setelah penyampaian materi.

Kegiatan UMKM Go Digitalisasi bertujuan untuk membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Babatan agar dapat mengadaptasi teknologi digital dalam usaha mereka. Praktikan turut berperan dalam memastikan

acara berjalan lancar dan memberikan dukungan penuh kepada peserta selama kegiatan berlangsung. Keikutsertaan praktikan dalam kegiatan ini memberikan pengalaman berharga dalam manajemen acara dan pengembangan UMKM berbasis digital.



Gambar 5.1 *UMKM (Mercy Corps Indonesia)*



Gambar 5.2 *UMKM (Mercy Corps Indonesia)*

5.3.2. Kegiatan Posyandu

Kegiatan Posyandu dan Posbindu dilaksanakan pada Senin, 11 November 2024, di Balai Desa Babatan. Kegiatan ini merupakan pertama kalinya dilaksanakan oleh pihak desa yang menggabungkan dua dusun sekaligus, dengan melibatkan berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak, balita, ibu hamil, dan lansia. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat di Desa Babatan

Praktikan turut berkontribusi dalam kegiatan ini dengan membantu para ibu-ibu PKK dalam berbagai tugas, seperti menimbang, mencatat hasil timbangan, mengukur lingkar pinggang dan tinggi badan peserta, serta mencatat hasil pengukuran tekanan darah. Dengan adanya keterlibatan praktikan, kegiatan Posyandu dan Posbindu ini dapat berjalan lebih lancar, dan praktikan memperoleh pengalaman langsung dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini juga memperkuat kerjasama antara pihak desa, masyarakat, dan praktikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat Desa Babatan.



Gambar 5.3 Kegiatan Posyandu



Gambar 5.4 Kegiatan Posyandu

5.3.3. Kerja Bakti

Kegiatan kerja bakti di Desa Babatan merupakan wujud nyata gotong royong dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin, melibatkan seluruh warga desa tanpa memandang usia maupun status sosial. Fokus kerja bakti meliputi pembersihan jalan desa, saluran air, fasilitas umum, serta penghijauan di sekitar permukiman. Dalam setiap pelaksanaannya, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi, menjadikan kerja bakti sebagai momen untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Selain menjaga kebersihan, kerja bakti juga mencerminkan budaya lokal yang mengutamakan solidaritas dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat Babatan. Hasil dari kegiatan ini adalah lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk semua warga



Gambar 5.3 Kerja Bakti

5.3.4. Siram Kebun

Di Desa Babatan, siram kebun menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh para petani dan penghobi tanaman untuk menjaga kebun mereka tetap subur. Dengan kondisi alam yang mendukung, kebun di desa ini banyak ditanami berbagai jenis tanaman seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Penyiraman kebun dilakukan setiap hari, terutama pada pagi atau sore hari, agar tanaman mendapatkan air yang cukup tanpa terpapar sinar matahari yang terlalu terik. Selain itu, dengan adanya sistem irigasi sederhana yang mengalirkan air dari sumber terdekat, warga Desa Babatan dapat memastikan kebunnya tetap subur, bahkan saat musim kemarau. Aktivitas ini menjadi bagian dari tradisi dan upaya untuk meningkatkan hasil pertanian yang berkelanjutan di desa.



Gambar 5.4 Siram Kebun

5.4. Tantangan Praktikum Komunitas

Dalam pelaksanaan praktikum komunitas ini, tentunya mahasiswa praktikan menemui beberapa tantangan. Namun ini menjadi hal yang justru menambah semangat mahasiswa praktikan untuk menghadapi praktikum komunitas ini. Berikut beberapa tantangan yang praktikan hadapi:

5.4.1. Dinamika Sosial dan Budaya

Desa Babatan memiliki karakteristik sosial budaya yang khas, termasuk keberagaman budaya, adat istiadat, agama, kepercayaan, dan tradisi masyarakat. Mahasiswa praktikan seringkali menghadapi tantangan dalam memahami norma dan nilai lokal, yang sangat memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan merespons program intervensi. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan budaya setempat dapat menghambat proses pendekatan dan penerimaan masyarakat terhadap program. Selain itu bahasa juga seringkali menjadi hambatan dalam proses komunikasi. Masyarakat Desa Babatan merupakan suku sunda yang sehari-hari menggunakan bahasa sunda. Mungkin mayoritas warga dapat berbahasa indonesia, namun dilihat dari penerimaan. Memang mahasiswa yang dapat berbahasa sunda

khususnya sunda halus lebih diterima dengan baik dan lebih mudah mengambil simpati masyarakat.

5.4.2.Masalah yang Kompleks

Sebagai wilayah dengan dinamika sosial yang beragam, Desa Babatan juga memiliki masalah sosial yang kompleks, seperti kemiskinan, kenakalan remaja, dan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Mahasiswa praktikan dituntut untuk melakukan pemetaan sosial yang mendalam untuk memahami akar permasalahan, namun keterbatasan waktu sering menjadi kendala dalam menganalisis dan merancang solusi yang tepat.

5.4.3.Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat

Menggerakkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu tantangan utama dalam pekerjaan sosial. Di Desa Babatan, mahasiswa praktikan sering menemui kesulitan dalam mendorong masyarakat untuk aktif terlibat, terutama di kelompok rentan seperti lansia, ibu rumah tangga, atau kelompok masyarakat yang skeptis terhadap perubahan. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan perangkat Desa juga memerlukan pendekatan yang persuasif agar tercipta sinergi yang baik.

5.4.4.Penguasaan Kompetensi Mahasiswa Praktikan

Sebagai calon pekerja sosial, mahasiswa praktikan dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi, analisis, dan manajemen program yang mumpuni. Namun, tantangan dalam adaptasi terhadap situasi nyata seringkali memunculkan rasa tidak percaya diri atau ketidakmampuan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Hal ini menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi melalui bimbingan intensif dari dosen dan supervisor lapangan

5.4.5.Internal Kelompok

Selain tantangan yang berasal dari luar kelompok, mahasiswa praktikan juga seringkali terhambat dengan tantangan yang datangnya dari dalam kelompok. Dimana dalam kelompok tentunya banyak sekali dinamika yang terjadi selama 40 hari kegiatan. Terlebih di praktikum komunitas ini setiap mahasiswa diharuskan merancang dan melaksanakan programnya sendiri. Ada beberapa masalah yang

terjadi, seperti waktu intervensi yang berbenturan satu sama lain, sasaran intervensi yang merujuk ke orang – orang tertentu saja, dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi tantangan yang cukup berat, walaupun akhirnya seluruh program yang dirancang dapat dijalankan dengan baik dengan kerjasama antar anggota kelompok.

BAB VI

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Simpulan (Temuan temuan penting selama praktikum)

Berdasarkan hasil praktikum komunitas yang telah dilakukan di Desa Babatan Kabupaten Kuningan, keberadaan praktikan dalam menjalani praktikum tidak hanya sekadar terpaku pada peran sebagai pengamat dan praktik. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa merupakan suatu proses yang tak hanya memperluas wawasan secara teoritis, tetapi juga memperdalam dalam ranah praktik. Dalam kegiatan ini mahasiswa diberi kesempatan untuk mengikuti beragam kegiatan praktikum yang menuntut praktikan untuk mempraktikkan keilmuan yang telah mahasiswa dapat di ruang kelas.

Namun, lebih dari sekadar rangkaian kegiatan praktikum yang terstruktur, mahasiswa juga diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam praktik pekerja sosial di ranah makro dari tahap membangun relasi (*dialog*), asesmen dan penyusunan rencana intervensi (*discovery*), intervensi, dan evaluasi (*development*), sampai dengan terminasi dan rujukan (*continuity*). Di ranah makro, praktikan berlatih menangani satu isu masalah secara mandiri menggunakan pendekatan *community work*. Pendekatan *community work* diterapkan untuk sasaran organisasi, masyarakat dan kebijakan. Mahasiswa dapat menggunakan kelompok yang telah ada atau membentuk tipe kelompok sendiri sebagai media untuk melakukan upaya perubahan komunitas. Sehingga hasil dari pelaksanaan praktikum komunitas ini ialah meningkatkan kompetensi mahasiswa, seperti meningkatnya kemampuan komunikasi personal, mendengarkan aktif, membantu masyarakat, penciptaan sebuah program, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemampuan memfasilitasi dan memotivasi, dan sebagainya.

Dengan kompetensi atau keterampilan yang dituangkan oleh praktikan, maka mahasiswa berhasil membuat beberapa program yang bertujuan menangani beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Babatan seperti permasalahan kemiskinan, kesehatan, kenakalan remaja, lansia, dan lingkungan. Tujuan pelaksanaan program bagi masyarakat Desa Babatan adalah untuk meningkatkan

kualitas hidup mereka melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas sosial-ekonomi-kesehatan. Dengan memberdayakan masyarakat, mereka tidak hanya menjadi lebih mandiri dan produktif, tetapi juga dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan mereka. Program ini memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi individu dan komunitas, sehingga membantu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, inklusif, dan berdaya saing.

6.2. Rekomendasi (untuk pengembangan dan pemberdayaan organisasi dan masyarakat, implementasi kebijakan dan penyuluhan sosial)

Rekomendasi Untuk Desa Babatab Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Desa Babatan untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dimana hal ini dapat dilakukan dengan mengupdate data masyarakat secara berkala sehingga data masyarakat yang dimiliki oleh Desa valid. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut yaitu :

- 1) Mengevaluasi data yang dimiliki oleh Desa, lalu menyamakan data tersebut dengan bagaimana keadaan yang sebenarnya
- 2) Menentukan data mana yang tidak valid dan apa yang membuat data tidak valid
- 3) Membuat format yang dapat mengisi data masyarakat dan diisi oleh masyarakat.
- 4) Memberikan himbauan kepada seluruh RT untuk mendata masyarakat dan kondisi dari masyarakat tersebut.

Desa Babatan diharapkan untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta yang ada Desa Babatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Desa Babatan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut ini:

- 1) Mengidentifikasi semua perusahaan swasta yang ada di Desa Babatan dan memahami fokus dari masing-masing perusahaan tersebut
- 2) Membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan masing-masing perusahaan

- 3) Mengidentifikasi potensi maupun kelebihan dari perusahaan tersebut dan bagaimana memanfaatkan potensi yang ada untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan kemajuan Desa Babatan.
- 4) Mengidentifikasi kekurangan atau masalah yang ditimbulkan dari perusahaan tersebut dan menentukan bersama bagaimana mengatasi masalah dari perusahaan tersebut.
- 5) Menciptakan satu program bersama dalam rangka mengatasi masalah yang ada di Desa Babatan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Desa Babatan.

Pemberdayaan Masyarakat dengan Program Inovasi Berbasis Komunitas: Mengembangkan program yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pelatihan dan Pendidikan: Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berbagai bidang, seperti kewirausahaan, kesehatan, dan lingkungan.

1) Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan

Evaluasi Perkembangan Berkala: Melakukan evaluasi rutin terhadap perkembangan Desa Babatan dengan menggunakan indikator yang jelas, seperti penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Penghargaan untuk lingkungan Berprestasi: Mengadakan lomba atau penghargaan bagi lingkungan yang menunjukkan kemajuan signifikan, sehingga dapat memotivasi Desa lain untuk berinovasi dan berkompetisi secara sehat

2) Kolaborasi dengan Stakeholder

Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Lembaga Non-Pemerintah: Menggandeng berbagai pihak untuk mendukung program-program pengembangan Desa Babatan Kolaborasi ini dapat berupa dukungan finansial, teknis, atau sumber daya manusia.

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah: Memastikan adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan yang mendukung pengembangan Desa serta alokasi anggaran yang memadai.

3) Fokus pada Kesehatan dan Kesejahteraan

Program Kesehatan Masyarakat: Mengimplementasikan program kesehatan yang menyorot isu-isu lokal seperti stunting atau penyakit menular.

Pengembangan Ekonomi Lokal: Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui pelatihan kewirausahaan dan dukungan terhadap produk lokal, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatan mereka.

4) Penggunaan Teknologi Informasi

Sistem Informasi Manajemen: Membangun sistem informasi untuk mengelola data Desa secara efisien, sehingga memudahkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Platform Digital untuk Partisipasi Masyarakat: Menggunakan aplikasi atau platform online untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai kebutuhan dan masalah di Desa Babatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyaf, & dkk. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Akhmad Purnama. 2018. *Jurnal PKS. Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga*, 17(4): 319- 328
- Berg-Weger, M. (2019). *Social Work And Social Welfare*. New York: Routledge 2016.
- Fajarina. 2018. *Perilaku Komunikasi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Di Kota Bandung*. Kebon Jeruk Jakarta.
- Juniandari, S., Ramadhani, S., & Hanum, F. (2023). *Research In Early Childhood Education And Parenting*.
- Karen K. Kirst-Ashman & Grafton H. Hull, J. (2009). *Understanding Generalist Practice*. Canada: Nelson Education, Ltd.
- Kirst-Ashman, C. H. (2015). *Understanding Human Behavior And The Social Environment*. Usa: Cengage Learning.
- Kirst-Ashman, K. K. (2010). *Social Work And Social Welfare Critical Thinking Perspectives*. Usa: Cengage Learning.
- Kirst-Ashman, K. K. (2015). *Social Work & Social Welfare*. Canada: Nelson Education, Ltd.
- Program Studi Pekerjaan Sosial. (2019). *Pedoman Praktikum Komunitas*. Bandung: STKS Bandung.
- Program Studi Pekerjaan Sosial. (2024). *Pedoman Praktikum Komunitas*. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
- Permensos. (2020). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Praktik Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Zastrow, C. (2017). *Intruccion To Social Work And Social Welfare*. Usa: Nelson Education, Ltd.

LAMPIRAN

Lampiran 1. MKM Go Digitalisasi bersama mercy corps indonesia



Lampiran 2. Kunjungan ke Sekolah Luar Biasa Di babatan



Lampiran 3. Berdialog dengan aparat desa memberitahu maksud tujuan praktikum



Lampiran 4. Foto Bersama Setelah MPA Selesai



Lampiran 5. Berdialog dengan Karang taruna di desa babatan



Lampiran 6. Menyiram tanaman Bersama ibu ibu KWT



Lampiran 7. Kegiatan Melaksanakan Top Bersama Penyandang Disabilitas Desa Babatan



Lampiran 8. Kegiatan Supervisi Bersama Dosen Pembimbing



Lampiran 9. Penerimaan Hadiah dalam Kegiatan HDI



Lampiran 10. Bersama Para penyandang Disabilitas desa babatan yang mengikuti kegiatan Hari Disabilitas Internasional



Lampiran 11. Penyuluhan Tentang Hak hak Disabilitas



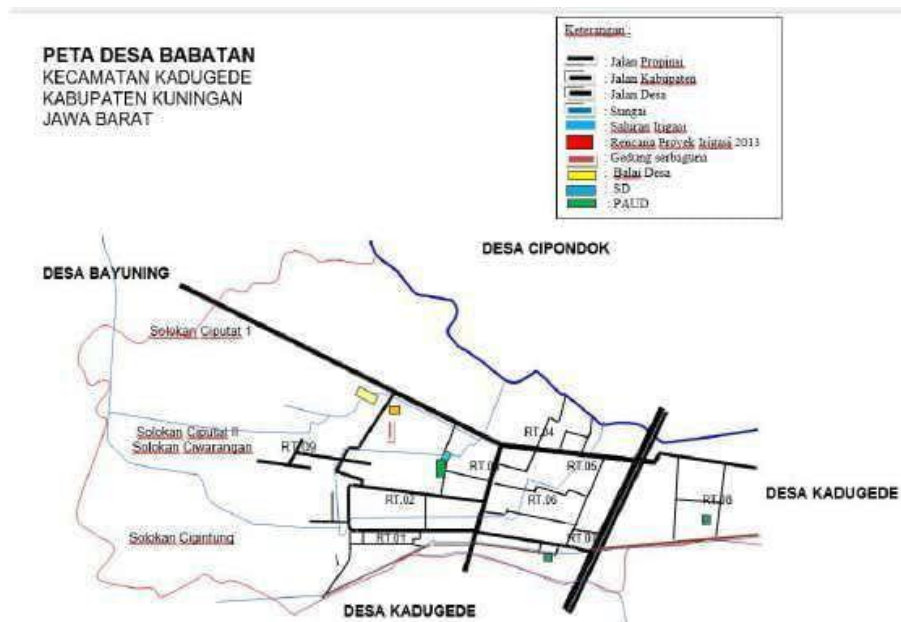
Lampiran 12. Kegiatan Loka karya Desa



Lampiran 13. Kegiatan Loka Karya Kecamatan



Lampiran 14. Peta Desa Babatan



Lampiran 15. Loka Karya Kabupaten

